



PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020



1 Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak

2 Akhiri perdagangan manusia

3 Akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan



DISUSUN OLEH:

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A)

KABUPATEN SOLOK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di kirimkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikan “Buku Profil Gender, Perempuan dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020”. Salawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok setiap tahunnya. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif dan berkesinambungan yang dipilah menurut jenis kelamin, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender sebagai acuan dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui data gender dan anak secara terpilah yang mencakup sebagai berikut:

- I. Daftar Jenis Kelembagaan
 1. Bidang Kesehatan
 2. Bidang Pendidikan
 3. Bidang ekonomi dan Ketenagakerjaan
 4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
 5. Bidang Ketenagakerjaan

II. Daftar Jenis Data Anak dan Perempuan

1. Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Kekerasan Terhadap Anak
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

III. Daftar Jenis Data Kelembagaan

1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
2. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Terselenggaranya buku profil Gender dan Anak secara data terpilah ini adalah berkat kerja sama yang baik dengan OPD/ Instansi/ Lembaga terkait melalui Tim Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Solok. Untuk itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pikiran, saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini. Kami menyadari bahwa dokumen data analisis gender ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk kesempurnaan buku ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Semoga buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok 2020 ini dapat berguna untuk semua pemangku kepentingan guna menjawab kelangkaan data terpilah, mudah-mudahan penyusunan buku ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

Koto Baru, September 2020
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok

ZULFAHMI, SH.MM
NIP. 19660326 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I	:	PENDAHULUAN.....	1
	1.1	Latar Belakang.....	1
	1.2	Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan.....	5
	1.3	Prinsip Prinsip Data Terpilah.....	6
	1.4	Sasaran.....	6
	1.5	Penjelasan Umum.....	7
BAB II	:	PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN.....	9
	2.1	Konsep Gender.....	9
	2.2	Pembangunan Berspektif Gender.....	13
BAB III	:	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK.....	17
	3.1	Visi dan Misi Kabupaten Solok.....	17
	3.2	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Solok.....	18
	3.3	Kondisi Geografis Kabupaten Solok.....	19
	3.4	Kondisi Kependudukan.....	22
BAB IV	:	PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN.....	26
	4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK).....	27
	4.2	Angka Partisipasi Murni (APM).....	30
	4.3	Angka Partisipasi Sekolah.....	32
	4.4	Angka Putus Sekolah.....	32
	4.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	33
	4.6	Angka Melek Huruf.....	33
	4.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah	34
	4.8	Jumlah Sekolah Inklusif (SDLB).....	34
	4.9	Jumlah SISWA (SDLB).....	35
	4.10	Jumlah GURU SDLB).....	35
BAB V	:	PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	36
	5.1	Angka Harapan Hidup.....	37
	5.2	Angka dan Penyebab Kematian Ibu Melahirkan.....	38
	5.3	Cakupan Pertolongan Persalinan.....	39
	5.4	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4).....	40
	5.5	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil.....	41
	5.6	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi.....	43
	5.7	Jumlah Kelahiran, Lahir Hidup, Lahir Mati dan Keguguran.....	46
	5.8	Jumlah Balita dan Gizi Buruk.....	47

	5.9	Balita Yang Mendapatkan Imunisasi.....	48
	5.10	Penderita HIV/AIDS.....	50
	5.11	Keluarga Berencana dan Pasangan Usia Subur (PUS)	51
	5.12	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus.....	53
	5.13	Jumlah Tenaga Medis Anak Berkebutuhan Khusus...	54
	5.14	Jumlah Tenaga Terapis.....	54
BAB VI	:	PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN.....	55
	5.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.....	55
	5.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif.....	57
	5.3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	60
	5.4	Organisasi Perempuan dan Masyarakat.....	63
	5.5	Pengurus LPM dan BPN se Kab. Solok.....	65
BAB VII	:	PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN.....	68
	7.1	Partisipasi Angkatan Kerja.....	68
	7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	70
	7.3	Penduduk 15 Tahun keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan.....	70
	7.4	Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan.....	71
	7.5	Pencari Kerja Terdaftar, Dihapuskan Dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan.....	72
	7.6	Pencari Kerja Terdaftar, Dihapuskan Dan Ditempatkan Menurut Umur.....	73
	7.7	Pencari Kerja Terdaftar, Yang Ditempatkan Dan Dihapuskan Menurut Klasifikasi Jabatan.....	74
	7.8	Usaha Mikro Dan Kecil (UMK).....	75
BAB VIII	:	PROFIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK....	77
	8.1	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	77
	8.2	Kekerasan Terhadap Anak.....	80
	8.3	Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).....	83
BAB IX	:	PROFIL DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN.....	86
	9.1	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.....	86
	9.2	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak.....	91
BAB X	:	PENUTUP.....	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas Negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan diberbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan sebagai selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Padahal bila ditinjau dari konteks kehidupan bermasyarakat perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagi peran di segala bidang kehidupan.

Keprihatinan Negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah dicatat dalam dokumen sejarah. Dimulai dari dicetuskannya The Universal declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang dijadikan landasan hukum tentang hak perempuan yaitu Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh majelis Ulama PBB pada tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) selanjutnya hak asasi perempuan yang merupakan hak asasi manusia kembali di deklarasikan pada konferensi Perserikatan Bangsa United World Ke-4 tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tahun 1995.

Deklarasi ini menyoroti 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia mencakup :

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Perempuan dan konflik bersenjata;
5. Kekerasan terhadap perempuan;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup;
12. Anak perempuan.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan internasional yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia, maka keadilan dan kesetaraan gender menjadi salah satu proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Bentuk komitmen tersebut kemudian dijabarkan dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Bentuk komitmen yang tertuang dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) mensyaratkan adanya kondisi awal dan komponen kunci PUG. Berikut ini kondisi awal dan komponen kunci PUG:

Tabel; 1.1 Komponen Kunci PUG

No	Kondisi Awal	Komponen Kunci PUG
1.	Komitmen Politik	Peraturan Perundang undangan

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

2.	Kerangka Kebijakan	Tindak lanjut atas ratifikasi, konvensi internasional, penyusunan system dan mekanisme akuntabilitas yang responsive gender, dan pelebagaan instuti PUG
3.	Struktur dan mekanisme pemerintah	Unit PUG, Focal Point, Pokja dan berbagai Forum
4.	Sumberdaya	Sumberdaya manusia dan sumber dana
5.	Sistem Informasi dan data	Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
6.	Alat Analisis	Analisis gender
7.	Masyarakat Madani	Mekanisme dialog dan proses yang partisipatif

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Solok dalam setiap sektor kehidupan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun disadari bahwa hasil pembangunan itu belum dapat dinikmati secara adil dan aspirasi perempuan belum optimal terakomodir oleh perempuan dan laki-laki secara adil.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk:

1. Mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, dalam dimensi tempat dan waktu.

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

2. Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.
3. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai pelaksana mandat ini dibentuk satuan kerja perangkat dinas setara dinas atau badan yang bertanggungjawab dalam menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Solok diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Mengacu pada mandat yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), DPPKBP3A menyusun Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020.

1.2 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan

Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020 secara umum dilakukan untuk menyediakan data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam penyelesaian permasalahan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Solok. penyediaan data terpilah jenis kelamin ini dimaksudkan untuk acuan bagi OPD/Instansi/Lembaga sebagai pertimbangan dalam Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Kabupaten Solok.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok 2020 bertujuan:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kab. Solok dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak
4. Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, social, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak, serta bidang-bidang yang menjadi isu gender di Kabupaten Solok.
5. Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan

1.3 Prinsip-prinsip Data Terlipah

Pelaksanaan penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020 merujuk pada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, penyelenggaraan Data Gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Spesifik artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
2. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
3. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, defenisi, klarifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
4. Relevan artinya data dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. Berkelanjutan artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

1.4 Sasaran

“Seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung dalam lembaga pemerintah (Departemen dan Non Departemen), Organisasi Perempuan, LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Swasta, Organisasi Keagamaan maupun pada masyarakat paling kecil yaitu keluarga.”

1.5 Penjelasan umum

1. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki laki dan perempuan.
2. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenaga kerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
3. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki laki yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun.
4. Data kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan yang terkait unsur unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak hak asasi perempuan dan laki laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki laki diseluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintah.
5. Data kelembagaan pengarusutamaan hak anak adalah data kelembagaan yang terkait unsur unsur prasyarat pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintah.
6. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk

informasi yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.

7. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variable yang menggambarkan situasi kondisi, posisi dan status laki laki dan perempuan.
8. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
9. Survey adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk meperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk Badan, Biro, Dinas atau Kantor.

BAB II

PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN

2.1 Konsep Gender

Merujuk pada konsep gender yang dikemukakan oleh United Nations (2001) Konsep gender perlu dipahami dengan jelas sebagai variable sosial-budaya lintas sektoral. Gender sebagai suatu konsep dan variable menyeluruh dalam arti bahwa gender juga dapat diterapkan kesemua variabel lintas sektoral lainnya seperti ras, kelas, usia, kelompok etnis, dll. Sistem gender dibentuk dalam sosial-budaya yang berbeda konteks yang menentukan apa yang diharapkan, diizinkan, dihargai dalam wanita/pria dan wanita/anak laki laki dalam hal konteks spesifik. Peran gender dipelajari melalui proses sosialisasi; mereka tidak tetap tapi bisa berubah. Sistem gender dilembagakan melalui sistem pendidikan, politik dan ekonomi system, undang-undang, dan budaya dan tradisi. Dalam memanfaatkan pendekatan gender, fokusnya tidak ada wanita dan pria perorangan tetapi pada sistem yang menentukan peran/tanggung jawab gender, akses control atas sumber daya, potensi pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Wood (2001) mendefenisikan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena feminitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kitalah yang menjadikan mereka berbeda.

Sehubungan dengan sejumlah definisi diatas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada bentuk dan fungsi biologis yang bersifat kodrat dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu konsep gender mengacu pada perbedaan perbedaan dan relasi sosial antara

perempuan dan laki laki yang dibentuk dan dipelajari sehingga dapat berubah seiring perkembangannya. Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan kepentingan gender (*gender inequility*). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antara Negara atau sektor tertentu. Merujuk pada United Nations (2002) terdapat sejumlah elemen yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengeksplorasikan bagaimana dan mengapa perbedaan gender dan ketidaksetaraan relevan dalam situasi tertentu.

1. Ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik (akses, pengambilan keputusan, representasi, dll)

Perempuan kurang terwakili dalam proses politik di seluruh dunia. Penting untuk melihat dan memahami perbedaan gender kekuasaan dalam struktur pengambilan keputusan formal (seperti pemerintah, dewan masyarakat dan lembaga pembuat kebijakan). Mengingat rendahnya representasi perempuan dan visibilitas pandangan perempuan yang rendah, kenyataan bahwa wanita sering memiliki prioritas, kebutuhan, dan minat yang berbeda daripada pria sering tidak jelas. Prioritas nasional, regional atau sub-regional, atau kebutuhan dan prioritas khusus dari suatu komunitas, seringkali didefinisikan tanpa masukan yang berarti dari wanita.

2. Ketimpangan dalam rumah tangga

Kesenjangan dalam hal akses dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya yang dimiliki keluarga. Investigasi perbedaan dan kesetaraan dalam rumah tangga relevan dengan pemahaman tentang berbagai masalah utama, termasuk kemampuan perempuan dan laki laki untuk menanggapi insentif ekonomi, desain strategi yang efektif untuk pencegahan HIV/AIDS, dan kebijakan jaminan sosial yang adil dan tepat.

3. Perbedaan status dan hak

Meskipun konstitusi nasional dan instrument internasional yang mewartakan persamaan hak untuk perempuan dan laki laki, ada banyak contoh dimana persamaan hak atas status pribadi, keamanan, tanah, warisan dan pekerjaan untuk wanita memiliki peluang ditolak secara hukum maupun praktik. Kendala yang dihadapi wanita adalah penting sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga penting untuk merumuskan strategi nasional yang efektif untuk meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencapai sumber daya manajemen yang berkelanjutan. Tindakan untuk mengamankan hak hak wanita tidak hanya kekwatiran kelompok kecil aktivis perempuan, melainkan tanggung jawab komunitas internasional secara keseluruhan.

4. Pembagian kerja pada sektor ekonomi

Disebagian besar Negara, perempuan dan laki-laki didistribusikan secara berbeda pada sektor manufaktur, antara sektor formal dan informal, dalam pertanian dan diantara pekerjaan. Perempuan juga lebih mungkin dibandingkan laki-laki berada di pekerjaan dengan bayaran rendah dan pekerjaan “tidak standar” (paruh waktu, sementara, berbasis rumah), dan cenderung memiliki akses yang lebih sedikit daripada laki-laki ke asset produktif seperti pendidikan, keterampilan, properti dan kredit. Pola-pola ini berarti Tren Ekonomi dan kebijakan ekonomi cenderung memiliki implikasi yang berbeda untuk wanita dan pria. Sebagai contoh, liberasi perdagangan telah terjadi dampak yang tidak merata berdasarkan sektor, dengan konsekuensi bagi kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi subyek penyelidikan.

5. Ketidakadilan pada sektor domestik/sektor tanpa upah

Dibanyak Negara, perempuanlah yang paling banyak memikul tanggung jawab dan tugas berkaitan dengan perawatan

dan pengasuhan keluarga (memasak, persiapan makanan, perawatan anak, perawatan orang sakit dan bersih-bersih). Dalam berbagai Negara-negara di Selatan, wanita juga memberikan kontribusi penting bagi produksi makanan keluarga dan penyediaan air dan kayu bakar. Tugas-tugas ini menambah beban kerja wanita dan sering menjadi hambatan untuk terlibat dalam politik dan memperluas kegiatan ekonomi. Penelitian terbaru telah dicari untuk menunjukkan hubungan antara “pekerjaan reproduksi” ini dan sektor “produktif” dari ekonomi-khususnya ketergantungan semua kegiatan produktif pada penciptaan dan pemeliharaan tenaga kerja yang sehat melalui pekerjaan ini di tingkat rumah tangga, dan jalan masuk dimana sektor reproduksi dapat dipengaruhi oleh konsekuensi kebijakan ekonomi yang terkait dengan perdagangan, investasi dan pengeluaran publik. Ada pergeseran penting dari fokus pada bagaimana kebijakan ekonomi telah mempengaruhi kesejahteraan dengan cara spesifik gender, untuk mengilustrasikan bagaimana bias gender berdampak negative terhadap sektor ekonomi produktif.

6. Kekerasan terhadap perempuan

Ketidaksetaraan gender juga dimanifestasikan dalam kekerasan berbasis gender, baik oleh pasangan intim wanita (kekerasan dalam rumah tangga), oleh tentara musuh sebagai senjata upaya ‘pembersihan etnis’ atau eksploitasi seksual, misalnya, perdagangan perempuan dan anak perempuan.

7. Diskriminasi

Ketidaksetaraan gender tidak hanya ekonomi, tetapi juga tercermin dalam cara-cara lain yang sulit diukur dan berubah. Gagasan tentang perilaku, kemandirian, dan kecakapan yang tepat sering didasarkan pada stereotip gender dan bervariasi untuk perempuan dan laki-laki. Gagasan dan praktik cenderung mencerminkan dan memperkuat satu sama lain (yang

memberikan alasan bagi yang lain), yang berkontribusi pada kompleksitas pencapaian perubahan.

2.2 Pembangunan Berperspektif Gender

Integrasi perspektif gender semakin terus digalakkan baik pada tataran kebijakan internasional maupun dalam skala nasional seperti di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kesetaraan gender masuk dalam tujuan kelima pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sasaran global pada tujuan kelima tersebut meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan,
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan,
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, masyarakat,
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.

Dalam konteks Indonesia, seperti yang tercantum dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan, dinyatakan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam siklus program pembangunan, sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun perencanaan yang responsife gender diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan

kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diberagam lini salah satunya ditunjukkan dengan menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 pemerintah mengintruksikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk mengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, tidak hanya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat sejumlah sasaran yang responsif gender diantaranya:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

Kualitas hidup dan peranan perempuan dalam pembangunan diukur dari status kesehatan ibu, rasio AMH/rasio rata rata lama sekolah/APS laki-laki dan perempuan, TPAK perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan sebagai pengambil keputusan di legislative, eksekutif dan yudikatif.

2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Hal ini ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Kondisi ini terlihat dari ketersediaan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KPPPA 2017).

Secara definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG, komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender analisis skill dan sumber dana yang memadai, data dan statistik gender, alat dan system monitoring dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, menyatakan bahwa “Dalam Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat kesetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah”.

Mengutip United Nations (2002) terdapat sejumlah tahapan dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan. Sebagai langkah pertama, perspektif gender harus dimasukkan dalam perumusan masalah kebijakan/pertanyaan yang harus ditangani. Definisi masalah akan menentukan ruang lingkup untuk memeriksa

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

isu isu gender dan untuk mengembangkan pendekatan konstruktif terhadap perbedaan dan kesetaraan gender. Selain itu, perumusan rekomendasi untuk pilihan kebijakan harus mencerminkan informasi dan analisis tentang isu-isu kesetaraan gender yang dihasilkan dari langkah sebelumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK

3.1 Visi dan Misi Kabupaten Solok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Visi Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi : Adat Basandi Syara;, Syara; Basandi Kitabullah, didukung oleh pemerintah nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku tigo sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

3.2 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Solok

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Visi:

MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS, PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG, SERTA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Untuk mewujudkan visi ini, maka Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Solok mempunyai Misi kedepan yakni:

- 1. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.**
- 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.**
- 3. Menghapus segala Bentuk Kekerasan kepada Perempuan dan Anak.**

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu – isu yang hendak dicapai pada Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender.
3. Menurunkan Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Sasaran :

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR).
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

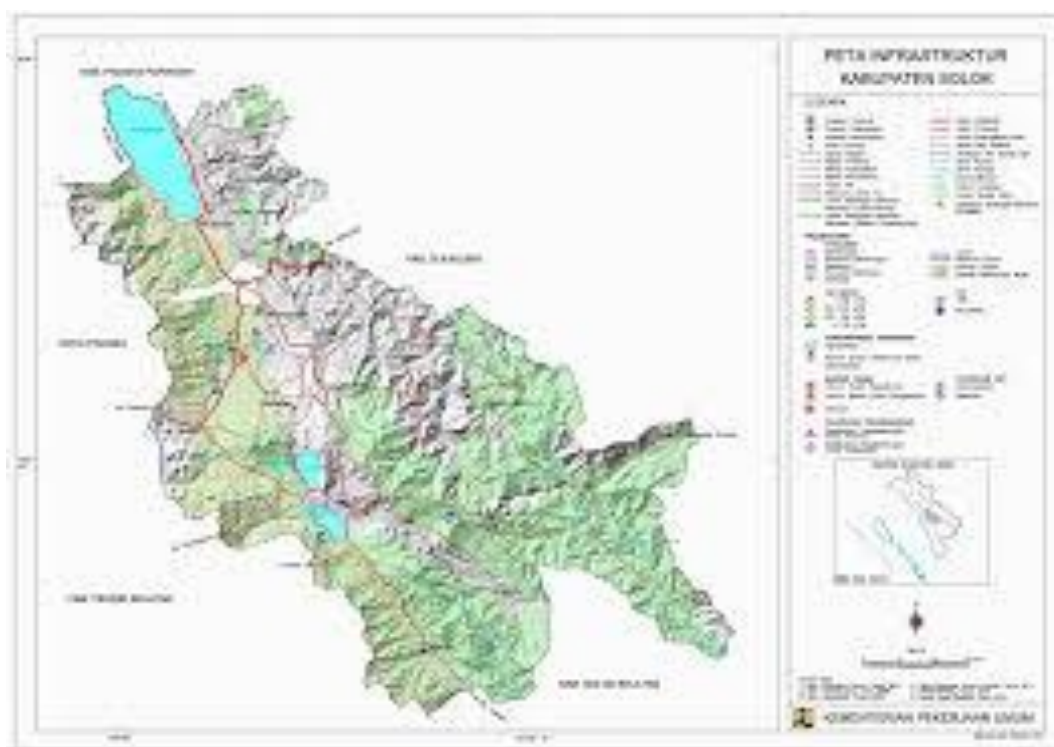
3.3 Kondisi Geografis Kabupaten Solok

Kabupaten Solok adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Solok terletak pada posisi 00o32'14" dan 01o46'45" Lintang Selatan dan 100o25'00" dan 101o41'41" Bujur Timur, Luas daratan Kabupaten Solok adalah 3.738 Km². Berada pada ketinggian antara 325 m hingga 1.458 m di atas permukaan laut. Kabupaten Solok secara administrasi terdiri dari 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 416 Jorong, yang terdiri atas penduduk perempuan dan laki-laki, beriklim tropis dengan temperatur pada kisaran 28,50-31,30o C dengan tingkat kelembaban udara 80%, curah hujan mencapai 268,93mm/tahun.

Secara umum daerah-daerah yang berada pada dataran tinggi di atas 1.400 meter di atas permukaan laut antara lain adalah Nagari

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

Alahan Panjang hingga Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti. Sementara daerah yang relatif landai terdapat di lereng Gunung Talang mulai dari Kecamatan Guguk, Batu Bajanjang, Bukit Sileh hingga ke arah utara sampai Koto Anau, Koto Laweh, Dilam, dan Parambahan. Selanjutnya daerah yang merupakan dataran rendah adalah Nagari Koto Baru, Muara Panas, Bukit Tandang, Kinari, Panyakalan, Selayo, Solok, Gaung, Saok Laweh, Sumani, dan Singkarak. Peta Kabupaten Solok adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar: Peta Kab. Solok

Kabupaten Solok berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah utara, dengan Kabupaten Sijunjung di sebelah timur, dengan Kabupaten Solok Selatan di sebelah selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang disisi baratnya. Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya yaitu memilik 4 (empat) buah danau yaitu Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau singkarak, Danau Talang yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

maupun internasional. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung merapi, yaitu Gunung Talang. Dilihat dari letaknya, posisi Kabupaten Solok juga sangat strategis karena disamping dilewati Jalur Lintas Sumatera, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang.

Semenjak pusat pemerintahan dialihkan ke Arosuka sebagai ibukota Kabupaten Solok, jarak tempuh ke Kota Padang selaku ibukota provinsi menjadi semakin pendek yaitu 40 km. Sedangkan jarak ke Kota Medan 825 km dan ke Banda Aceh 1.433 km. Disisi lain terjadi sedikit penambahan jarak kalau bepergian dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi lain seperti Pekanbaru (231 km), Jambi (495 km), Palembang via Muara Enim (993 km), Bengkulu via Muaro Bungo (736 km) dan Bandar Lampung (1.170 km).

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha (7.084.02 km²) menjadi 373.800 Ha (3.738.00 km²).

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2019 luas lahan sawah yaitu 23.438 ha. Areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

**Tabel 3.1.
LUAS LAHAN SAWAH MENURUT JENIS IRIGASI DI KABUPATEN
SOLOK
TAHUN 2019**

Jenis Irigasi							
No	Kecamatan	Teknis	Teknis Semi	Sederhana	Non PU	Tadah Hujan	Total
1	Pantai Cermin	720	88	342	466	-	1.616
2	Lembah Gumanti	-	304	347	-	231	882
3	Hiliran Gumanti	-	-	473	607	79	1.159
4	Payung Sekaki	525	-	227	431	88	1.271
5	Tigo Lurah	-	-	665	512	20	1.197
6	Lembang Jaya	839	893	41	687	-	2.460
7	Danau Kembar	-	-	-	54	-	54
8	Gunung Talang	608	1.673	1.008	-	-	3.369
9	Bukit Sundi	1.730	596	6	736	-	3.068
10	IX Koto S.Lasi	126	75	787	201	-	1.189
11	Kubung	1.330	1.002	80	400	326	3.138
12	X Koto Diatas	-	113	1.014	159	91	1.377
13	X Koto Singkarak	650	392	776	40	139	1.997
14	Junjung Sirih	109	392	126	34	-	661
	TOTAL	6.637	5.528	5.972	4.327	974	23.438

Sumber: BPS Kab. Solok

3.4 Kondisi Kependudukan

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang terampil dan handal. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok penduduk tahun 2019 berjumlah 387.868 jiwa yang terdiri dari 194.661 jiwa laki-laki atau dan 193.207 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan perkembangan penduduk masing-masing kecamatan terlihat Kecamatan Kubung tetap merupakan Kecamatan terbesar jumlah penduduknya yaitu 60.992 jiwa. Kemudian di ikuti oleh Kecamatan Lembah Gumanti di posisi kedua dengan jumlah penduduk 59.449 jiwa dan Kecamatan Gunung Talang pada posisi ketiga dengan jumlah penduduk 52.947 jiwa, sedangkan Kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 9.021 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Pantai Cermin	11,155	11,100	22,255
2	Lembah Gumanti	30,124	29,325	59,449
3	Hiliran Gumanti	9,263	8,922	18,185
4	Payung Sekaki	4,522	4,499	9,021
5	Tigo Lurah	5,268	5,204	10,472
6	Lembang Jaya	14,931	14,556	29,490
7	Danau Kembar	10,968	10,595	21,563
8	Gunung Talang	26,363	26,584	52,947
9	Bukit Sundi	12,928	13,254	26,182
10	IX Koto Sungai Lasi	5,533	5,387	10,920
11	Kubung	30,575	30,417	60,992
12	X Koto Diatas	9,603	9,776	19,379
13	X Koto Singkarak	17,011	17,264	34,275
14	Junjung Sirih	6,417	6,321	12,738
	TOTAL	194,661	193,207	387,868

Sumber: BPS Kab. Solok

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

Anak berusia 0-18 tahun di Kabupaten Solok berjumlah 132.767 jiwa, yang terdiri dari 68.240 jiwa laki-laki dan 64.527 jiwa perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
JUMLAH ANAK BERUSIA 0-18 TAHUN MENURUT
JENIS KELAMIN
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Pantai Cermin	3,820	3,680	7,500
2	Lembah Gumanti	11,281	10,719	22,000
3	Hiliran Gumanti	3,312	3,115	6,427
4	Payung Sekaki	1,503	1,337	2,840
5	Tigo Lurah	2,019	1,923	3,942
6	Lembang Jaya	5,583	5,206	10,789
7	Danau Kembar	4,045	3,918	7,963
8	Gunung Talang	9,192	8,753	17,945
9	Bukit Sundi	4,450	4,315	8,765
10	IX Koto Sungai Lasi	1,780	1,587	3,367
11	Kubung	10,530	9,842	20,372
12	X Koto Diatas	2,981	2,883	5,864
13	X Koto Singkarak	5,606	5,179	10,785
14	Junjung Sirih	2,138	2,070	4,208
	TOTAL	68,240	64,527	132,767

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok

Yang menarik dari perspektif gender berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur ada jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat jumlah penduduk menurut kelompok umur hasil proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 dalam data BPS Kabupaten Solok terlihat jumlah penduduk terbesar adalah kelompok umur 5-9 tahun yaitu 19.891 jiwa laki-laki dan 19.405 jiwa perempuan dan kelompok umur 0-4 tahun yaitu 19.211 jiwa laki-laki dan 18,469 jiwa perempuan dan diposisi ketiga yaitu kelompok umur 10-14 tahun yaitu 18.956 jiwa laki-laki dan 18.329 jiwa perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

**Tabel 3.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	0 – 4	19,211	18,469	37,680
2	5 – 9	19,891	19,405	39,296
3	10 – 14	18,956	18,329	37,285
4	15 – 19	16,631	15,920	32,551
5	20 – 24	13,942	13,567	27,509
6	25 – 29	13,958	13,787	27,749
7	30 – 34	13,270	13,175	26,445
8	35 – 39	11,765	12,295	24,060
9	40 – 44	11,089	11,902	22,991
10	45 – 49	10,719	11,403	22,122
11	50 – 54	9,638	10,364	20,002
12	55 – 59	8,796	9,418	18,214
13	60 – 64	6,739	7,200	13,939
14	65 – 69	4,559	5,184	9,743
15	70 – 74	2,774	3,463	6,237
16	75	2,874	4,721	7,595
	TOTAL	184,812	188,602	373,414

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok

BAB IV

PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Bidang Pendidikan Dasar menjadi salah satu indikator cakupan atau ruang lingkup profil gender. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat dasar dan penting bagi suatu bangsa. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peran pendidikan menjadi penting guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Hubungan pendidikan dasar dengan gender dimaksudkan adanya kesamaan hak dalam memperoleh dan akses fasilitas pendidikan yang sama tidak terpisah atas salah satu gender dan berdasar kemampuan.

Pendidikan merupakan suatu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Suatu masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berlandaskan pada pasal 31 UUD 1945.

Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiap warga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan Informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasikan sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pegambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Data tahun 2017 menunjukkan APK pendidikan di Kabupaten Solok tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu 114,89 pada laki-laki dan 111,02 pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia lebih muda.

Tabel 4.1

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2017

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan					
		SD			SMP		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pantai Cermin	123,70	121,54	122,68	106,80	120,17	113,34
2	Hiliran Gumanti	109,86	110,35	110,10	96,88	95,05	96,00
3	Lembah Gumanti	130,48	128,20	129,38	78,65	95,24	86,86
4	Tigo Lurah	104,74	105,34	105,02	44,68	56,20	50,18
5	Payung Sekaki	112,13	110,07	111,19	101,45	110,34	105,51
6	Danau Kembar	121,34	112,90	117,07	41,27	48,88	44,97
7	Lembang Jaya	120,10	116,22	118,22	75,77	87,61	81,66
8	Gunung Talang	113,85	113,02	113,45	101,34	105,40	103,33
9	Bukit Sundi	114,71	109,16	111,95	69,77	80,43	75,05
10	Kubung	106,09	101,04	103,65	73,52	81,69	77,47

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

11	Ix Koto Sei Lasi	103,90	98,11	101,16	92,55	98,30	95,18
12	Junjung Sirih	125,17	113,81	119,67	74,50	106,94	90,44
13	X Koto Singkarak	113,16	111,19	112,24	98,22	97,74	97,98
14	X Koto Diatas	109,24	103,32	106,30	72,23	81,12	76,49
		114,89	111,02	113,01	80,54	90,37	85,32

Sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian APK di Kabupaten Solok. APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMP yaitu pada anak laki-laki sebesar 80,54 persen, sedangkan berdasarkan tingkat kecamatan APK terendah pada Kecamatan Danau Kembar yaitu 41, 27 persen laki-laki dan perempuan sebesar 48,88 persen. APK tertinggi pada kecamatan Lembah Gumanti yaitu 130, 48 persen laki-laki dan perempuan sebesar 128,20 persen.

APK tahun 2019 berdasarkan data dari BPS Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2019

NO	Kabupaten	Angka Partipasi Kasar (APK)		
		SD	SMP	SMA
1	Kab. Solok	108,25	95,98	72,48

Sumber data: BPS Kabupaten Solok

APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada tingkat SMP.

Perlu diketahui, angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas.

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, angka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 4.3

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2017

No	Kecamatan	Umur Sekolah								
		SD			SMP			SMA/SMK		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	X KOTO DIATAS	88,81	89,66	89,23	66,61	73,02	69,68	26,23	38,58	32,27
2	X KOTO SINGKARAK	95,06	98,00	96,42	70,16	78,95	74,60	47,62	63,31	55,29
3	JUNJUNG SIRIH	101,08	97,55	99,37	57,05	72,45	64,62	38,38	69,75	53,22
4	X KOTO SEI LASI	83,73	87,74	85,63	60,46	72,11	65,79	23,13	29,84	26,53
5	KUBUNG	90,55	89,98	90,28	54,79	60,28	57,44	31,55	56,69	43,38
6	BUKIT SUNDI	90,00	90,69	90,34	38,88	52,85	45,80	37,66	55,18	46,21
7	GUNUNG TALANG	97,35	100,33	98,79	72,74	83,27	77,90	63,35	98,18	79,61
8	LEMBANG JAYA	95,96	98,20	97,04	41,48	57,26	49,34	10,40	20,23	15,23
9	DANAU KEMBAR	93,21	94,46	93,84	23,02	28,63	25,75	7,70	9,43	8,57
10	PAYUNG SEKAKI	96,87	97,42	97,12	72,46	81,90	76,77	29,64	44,98	36,86
11	TIGO LURAH	78,75	85,46	81,86	33,10	43,54	38,09	4,16	5,13	4,62
12	LEMBAH GUMANTI	103,44	105,58	104,48	47,97	63,21	55,52	22,72	49,19	35,51

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

13	Hiliran GUMANTI	89,95	93,67	91,72	55,78	62,12	58,81	27,11	35,31	31,05
14	PANTAI CERMIN	102,13	102,03	102,08	51,90	71,24	61,36	42,18	54,34	48,40
	Jumlah	93,35	95,06	94,16	53,31	64,35	58,67	29,42	45,01	36,91

Sumber data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

Dari tabel diatas terlihat perbandingan nilai APM antara anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak anak laki-laki yaitu dengan nilai 93,35, pada jenjang SMP dan SMA lebih banyak perempuan, pada tingkat SMP perempuan dengan nilai 64,35, dan pada jenjang SMA dengan nilai 45, 01. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa terlambat atau terlalu cepat sekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan nilai APM di kecamatan, menunjukkan bahwa APM pada tingkat SD tertinggi di Kecamatan Lembah Gumanti dengan nilai laki-laki 103,44 dan perempuan 105,58. Dan terendah di Kecamatan Tigo Lurah dengan nilai 78,75 laki-laki dan perempuan 85, 46. APM pada tingkat SMP tertinggi pada Kecamatan Gunung Talang dengan nilai 72,74 laki laki, sedangkan perempuan 83,27. Dan terendah di kecamatan Danau Kembar dengan nilai 23,02 laki-laki sedangkan perempuan 28,63. APM pada tingkat SMA tertinggi pada kecamatan Gunung Talang dengan nilai 63,35 sedangkan kan perempuan 48,18. Dan terendah di kecamatan tigo lurah dengan nilai 4,16 laki-laki sedangkan perempuan 5,13.

APM tahun 2019 berdasarkan data dari BPS Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4
APM MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN 2019**

No	Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMA
1	Kab. Solok	99,07	78,16	57,04

Sumber data: BPS Kabupaten Solok

4.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

**Tabel 4.5
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Tidak/Belum Sekolah	4,79	5,95
2.	Masih Sekolah	28,02	26,35
3.	Tidak Sekolah Lagi	67,19	67,70

Sumber data: BPS Kabupaten Solok

4.4 Angka Putus Sekolah

Ketika berbicara program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah menysasar pada jenjang SD, SMP dan SMA yang pada hakekatnya itu merupakan satu sistem kesatuan yang holistik menyeluruh dan tiap jenjang pendidikan berkaitan antara

satu dengan yang lain terlebih ini berkaitan dengan potensi dan kualitas SDM yang ada di wilayah tersebut.

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan pendidikan tertentu. Berdasarkan data BPS persentase angka putus sekolah di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6
ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS) MENURUT
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	Tidak/Belum Sekolah	4,79	5,95
2.	Masih Sekolah	28,02	26,35
3.	Tidak Sekolah Lagi	67,19	67,70

Sumber data: BPS Kabupaten Solok

4.5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

**Tabel 4.7
ANGKA RATA RATA LAMA SEKOLAH DAN
HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Rata rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
1.	7,85	13,03

Sumber data: BPS Kab. Solok

4.6. Angka Melek Huruf

**Tabel 4.8
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN
KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT JENIS
KELAMIN DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	2019	99,55	99,34	99,44

Sumber data: BPS Kabupaten Solok

4.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah

Tabel 4.9

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
SEKOLAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kelompok Umur Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	4 -6	12.188	11.866	24.054
2.	7-12	23.606	22.930	46.536
3.	13 -15	10.926	10.521	21.447
4.	16 – 18	10.152	9.754	19.906
	Jumlah	56.872	55.070	111.942

4.8. Jumlah Sekolah Inklusif (SDLB)

Tabel 4.10

**JUMLAH SEKOLAH INKLUSIF (SDLB) PER KECAMATAN
DI KAB. SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Sekolah	Ruang Kelas
1	Pantai Cermin	-	-
2	Lembah Gumanti	1	5
3	Hiliran Gumanti	-	-
4	Payung Sekaki	1	3
5	Tigo Lurah	-	-
6	Lembang Jaya	-	-
7	Danau Kembar	1	-
8	Gunung Talang	-	-
9	Bukit Sundi	2	7
10	IX Koto Sungai Lasi	-	-
11	Kubung	3	15
12	X Koto Diatas	1	5
13	X Koto Singkarak	1	3
14	Junjung Sirih	-	-
	TOTAL	10	38

Sumber: BPS Kab. Solok

4.9. Jumlah SISWA (SDLB)

Tabel 4.11

**JUMLAH SEKOLAH SISWA SDLB PER KECAMATAN
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pantai Cermin	-	-	-
2	Lembah Gumanti	19	12	31
3	Hiliran Gumanti	-	-	-
4	Payung Sekaki	7	10	17
5	Tigo Lurah	-	-	-
6	Lembang Jaya	-	-	-
7	Danau Kembar	-	-	-
8	Gunung Talang	-	-	-
9	Bukit Sundi	25	26	51
10	IX Koto Sungai Lasi	-	-	-
11	Kubung	49	30	79
12	X Koto Diatas	6	4	10
13	X Koto Singkarak	16	13	29
14	Junjung Sirih	-	-	-
	TOTAL	130	98	219

Sumber: BPS Kab. Solok

4.10. Jumlah GURU SDLB)

Tabel 4.12

**JUMLAH GURU SDLB PER KECAMATAN
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pantai Cermin	-	-	-
2	Lembah Gumanti	4	4	8
3	Hiliran Gumanti	-	-	-
4	Payung Sekaki	1	2	3
5	Tigo Lurah	-	-	-
6	Lembang Jaya	-	-	-
7	Danau Kembar	-	3	3
8	Gunung Talang	-	-	-
9	Bukit Sundi	-	8	8
10	IX Koto Sungai Lasi	-	-	-
11	Kubung	5	12	17
12	X Koto Diatas	-	3	3
13	X Koto Singkarak	1	1	2
14	Junjung Sirih	-	-	-
	TOTAL	11	33	44

Sumber: BPS Kab. Solok

BAB V

**PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesehateraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan keluarga berencana. Pembangunan di bidang kesehatan menjadi salah satu isu prioritas Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perhatian Pemerintah Kabupaten Solok terhadap kesehatan terus ditingkatkan sesuai dengan misi Kabupaten Solok yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan

baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program keluarga berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

5.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi baru lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok angka harapan hidup tahun 2019 adalah 67,66 tahun. Artinya bila pada tahun 2019 angka harapan hidup mencapai 67 tahun berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 diperkirakan akan hidup selama 67- 68 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

Angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak, karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Makin rendahnya tingkat kematian bayi, makin rendah angka harapan hidup. Sebaiknya semakin tinggi tingkat kematian bayi, makin rendah angka harapan hidup.

Kegunaan Angka Harapan Hidup adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya derajat kesehatan.

5.2 Angka dan Penyebab Kematian Ibu Melahirkan.

Berdasarkan WHO, kematian ibu merupakan kehamilan atau periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya. Pada dasarnya kematian ibu melahirkan akibat dari faktor utama tersebut dapat dicegah atau dikurangi dengan pemeriksaan rutin tenaga medis pada saat kehamilan atau menjelang kelahiran. Selain itu tidak cepatnya penanganan proses melahirkan, terutama jika ada faktor penyulit menjadi hal yang menyebabkan ibu melahirkan tidak terselamatkan nyawanya.

Tabel. 5.1
JUMLAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
1.	Pantai Cermin	1
2.	Lembah Gumanti	3
3.	Hiliran Gumanti	0
4.	Payung Sekaki	0
5.	Tigo Lurah	0
6.	Lembang Jaya	0
7.	Danau Kembar	2
8.	Gunung Talang	2
9.	Bukit Sundi	2
10.	IX Koto Sungai Lasi	0
11.	Kubung	2
12.	X Koto Diatas	1
13.	X Koto Singkarak	0
14.	Junjung Sirih	1
	Jumlah	14

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Solok

Data terkait kematian ibu, baik normal maupun dalam tahap melahirkan sepanjang tahun 2019 menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tercatat 14 kasus kematian ibu melahirkan, penyebab kematian ibu melahirkan disebabkan oleh faktor Eklamsia dengan jumlah 2 kasus, pendarahan 1 kasus, infeksi 1 kasus dan berapa sebab lainnya ada 10 kasus. Kasus-kasus tersebut terjadi di

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

Kecamatan Pantai Cermin, Lembah gumanti, Danau Kembar, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung, X koto Diatas, dan Junjung Sirih.

Tabel. 5.2
PENYEBAB KEMATIAN IBU MELAHIRAN
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Penyebab Kematian Ibu, Melahiran dan Nifas							
		Eklam sia	Infek si	Abort us	P.La ma/ Macet	Emboli Obstetri	Kompl Masa Puepure um	Pend arah an	Lain Lain
1	Pantai Cermin	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Lembah Gumanti	1	0	0	0	0	0	1	1
3	Hiliran Gumanti	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Payung Sekaki	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tigo Lurah	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lembang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Danau Kembar	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Gunung Talang	0	0	0	0	0	0	0	2
9	Bukit Sundi	0	1	0	0	0	0	0	1
10	IX Koto S. Lasi	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kubung	0	0	0	0	0	0	0	2
12	X Koto Diatas	0	0	0	0	0	0	0	1
13	X Koto Singkarak	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Junjung Sirih	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Solok Tahun 2019 adalah rata-rata diatas 90 persen sudah memenuhi target kementerian kesehatan (Depkes, 2010). sebagai alat ukur dan evaluasi dalam hal keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kaum ibu, khususnya kesehatan menjelang dan selama kehamilan sampai melahirkan, perawatan masa nifas, dan turut menyehatkan balitanya melalui air susu ibu(ASI). Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu di

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

Indonesia jelas dipengaruhi oleh faktor penolong persalinan oleh kaum tenaga medis.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melahirkan pada tenaga medis, seperti dokter atau bidan cukup tinggi. Selain itu akses terhadap fasilitas kesehatan juga tinggi, namun beberapa kecamatan masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun. Program-program asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin, seperti Kartu Indonesia Sehat dan akses BPJS oleh masyarakat turut meningkatkan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga medis.

Tabel. 5.3
JUMLAH CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Penolong Persalinan		
		Dokter	Bidan	Dukun
1	Pantai Cermin	11	300	21
2	Lembah Gumanti	179	952	9
3	Hiliran Gumanti	30	240	15
4	Payung Sekaki	34	90	0
5	Tigo Lurah	16	150	15
6	Lembang Jaya	10	451	0
7	Danau Kembar	35	330	0
8	Gunung Talang	190	703	0
9	Bukit Sundi	35	384	0
10	IX Koto Sungai Lasi	30	127	0
11	Kubung	84	998	0
12	X Koto Diatas	32	198	0
13	X Koto Singkarak	68	403	0
14	Junjung Sirih	46	108	0
	Jumlah	800	5434	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

Antenatal Care atau dikenal dengan ANC merupakan suatu pemeriksaan yang sangat penting untuk ibu hamil. ANC terdiri atas K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Kemenkes RI 2012).

Tabel dibawah ini menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 pada tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Solok pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel. 5.4
JUMLAH KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1/K4) KE
SARANA PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		K1	K4
1	Pantai Cermin	78,2	80,9
2	Lembah Gumanti	98,4	82,35
3	Hiliran Gumanti	84,4	80,3
4	Payung Sekaki	73,1	59,1
5	Tigo Lurah	92,7	70,1
6	Lembang Jaya	90,7	79,0
7	Danau Kembar	94,1	76,6
8	Gunung Talang	91,0	73,9
9	Bukit Sundi	94,9	84,0
10	IX Koto Sungai Lasi	78,3	56,6
11	Kubung	89,3	83,25
12	X Koto Diatas	62,95	52,70
13	X Koto Singkarak	79,8	61,9
14	Junjung Sirih	62,7	47

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.5 Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil

Berikut adalah data jumlah imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu Hamil di Kabupaten Solok. Diketahui, TT 1 sebanyak 761 orang, TT 2 sebanyak 1.064 orang di sepanjang tahun 2019. Pada tahun tersebut terdata bahwa imunisasi TT 2 paling banyak dan yang paling rendah adalah TT 1. Perlu diketahui bahwa Tetanus disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui luka terbuka dan

menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat. Penderita mengalami kejang otot serta diikuti kesulitan menelan dan bahkan bernafas.

Tetanus khususnya beresiko pada bayi-bayi yang dilahirkan dengan bantuan dukun bayi di rumah dengan peralatan yang tidak steril. Mereka juga beresiko ketika alat-alat yang tidak bersih digunakan untuk memotong tali pusar dan olesan-olesan tradisional atau abu digunakan untuk menutup luka bekas potongan. Upaya pencegahan tetanus neonatorum dilakukan dengan memberikan imunisasi TT (Tetanus Toksoid) pada ibu hamil. Konsep imunisasi TT adalah life long immunization yaitu pemberian imunisasi TT 1 sampai dengan TT 5. Skema life long immunization adalah sebagai berikut:

1. TT 0, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi.
2. TT 1, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi.
3. TT 2, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi.
4. TT 3, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas satu.
5. TT 4, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas dua.
6. TT 5, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas tiga.

Manfaat Imunisasi TT Ibu Hamil, adalah melindungi bayi baru lahir dari tetanus neonatorum (BKKBN, 2005; Chin, 2000). Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (bayi berusia kurang 1 bulan) yang disebabkan oleh *clostridium tetani*, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat (Saifuddin dkk, 2001), serta melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka (Depkes RI, 2000).

Tabel. 5.5
JUMLAH IMUNISASI TETANUS TOXOID (TT) PADA
IBU HAMIL
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		TT 1	TT 2
1	Pantai Cermin	12	23
2	Lembah Gumanti	179	232
3	Hiliran Gumanti	71	118
4	Payung Sekaki	3	4
5	Tigo Lurah	121	67
6	Lembang Jaya	0	33
7	Danau Kembar	177	189
8	Gunung Talang	80	120
9	Bukit Sundi	7	49
10	IX Koto Sungai Lasi	3	13
11	Kubung	4	60
12	X Koto Diatas	0	3
13	X Koto Singkarak	0	5
14	Junjung Sirih	104	148
	Jumlah	761	1.064

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.6 Ibu Hamil Yang Mendapatkan Zat Besi

Penting untuk ibu hamil memenuhi kebutuhan zat besi selama masa kehamilan. Sebab, zat besi memiliki peranan penting untuk pertumbuhan janin. Tidak hanya itu saja, dengan mencukupi kebutuhan zat besi selama kehamilan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah anemia pada ibu hamil. Karena selama kehamilan, volume darah pada ibu hamil meningkat 40- 60%, maka untuk memenuhi kebutuhan ibu menyuplai makanan serta oksigen melalui plasenta dan sampai ke janin, maka ibu hamil harus mengonsumsi zat besi sekitar 40-50mg per hari.

Anemia saat hamil memberikan berdampak buruk pada ibu khususnya pada periode kehamilan trimester ketiga. Berat badan turun, pendarahan hingga keguguran bisa disebabkan oleh ibu yang menderita anemia di masa kehamilan. Zat besi juga membantu

dalam mempercepat proses penyembuhan luka khususnya setelah melahirkan.

Zat besi merupakan salah satu mineral yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah (eritrosit) yang di buat di sumsum tulang belakang. Pada kondisi tubuh wanita yang sedang hamil, kandungan darah merah tentu tidak sama dengan orang dalam kondisi normal. Mengapa ibu hamil memerlukan eritrosit lebih banyak ? alasannya adalah:

1. Pengantar oksigen di dalam tubuh Manfaat zat besi bagi ibu hamil yang paling utama adalah untuk mengantarkan oksigen di seluruh tubuh, termasuk janin. Semua organ di dalam tubuh memerlukan oksigen untuk membantu menjalankan aktivitasnya. Entah jantung, paru paru, otak, dan organ vital lainnya. Dengan bantuan oksigen inilah yang akan menggerakkan organ bekerja sesuai semestinya.
2. Mengedarkan sari pati makanan di dalam tubuh Oksigen selain membantu organ menjalankan aktivitasnya, juga berperan untuk mengantarkan sari pati makanan. Tentu saja organ tidak bisa bekerja jika bahan bakar untuk menjalankan mesinnya tidak di isi. Untuk itu sari pati makanan yang sudah di proses ini di edarkan ke selauruh tubuh dan di serap nutrisinya oleh organ organ yang memerlukan.
3. Membantu meningkatkan hormon tubuh saat wanita tengah dalam masa masa kehamilan memerlukan cukup banyak jenis hormon. Hal ini membantu dan mempengaruhi 63 perkembangan dan pertumbuhan si bayi di dalam perut. Hormon ini pula juga akan membantu mempermudah prosesi kelahiran.
4. Membantu pembentukan plasenta Bayi yang hidup dan tinggal di perut ibunya juga merasakan makanan yang ibundanya makan. Apa saja makananya, pasti aka nada jalan yang menghubungkan hasil sari pati makanan ke tubuh bayi. Nah saluran untuk menghubungkan ini di namakan plasenta. Makanan akan masuk

lewat lubang di perut (udel) melalui saluran plasenta inilah. Itulah mengapa ibu hamil harus sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam mulutnya untuk menjaga perkembangan janin.

5. Membantu membentuk energi Ibu hamil tentu saja memerlukan energi ekstra lebih kuat dari wanita normal lainnya. Sebab dalam satu waktu, dalam satu tubuh ia menggendong 2 nyawa sekaligus. Energi yang di perlukan tentu lebih banyak. Itulah mengapa mereka sangat di anjurkan untuk banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Sebab fungsi zat besi antara lain membantu pembentukan energi di dalam tubuh. Baca juga : Gizi ibu hamil berdasarkan trimester kehamilan.
6. Mengurangi resiko anemia. Anemia merupakan gejala gangguan tubuh yang menyebabkan penderita sering pingsan dan gangguan kehamilan yang cukup berbahaya. Hal ini dapat terjadi karena mereka kekurangan asupan oksigen di dalam tubuh. Ibu hamil memang cukup rentan terkena anemia. Sebab mereka bekerja lebih berat dari biasanya, namun energi dan nutrisi dalam tubuh harus di bagi dua dengan diri ibunda hamil sendiri serta anak yang ada di kandungannya. Untuk itu mengkonsumsi zat besi sangat mutlak di perlukan oleh tubuh.
7. Mengurangi resiko lahirnya bayi kekurangan berat badan Ketika sang ibunda tidak memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk tubuhnya, sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Salah satu pengaruh nyatanya adalah kelahiran bayi dengan berat badan rendah.
8. Mengurangi pendarahan saat persalinan Persalinan merupakan moment dimana akhir dari masa kehamilan. Merupakan kejadian yang cukup menegangkan, sebab menjadi pertempuran antara hidup dan matinya wanita. Kondisi ibu akan sangat berbahaya jika sampai mengalami pendarahan hebat. Sebab saat persalinan sendiri memerlukan cukup banyak darah untuk membantu mengeluarkan bayi dari rahim. Apalagi sampai terjadi keadaan

pendarahan, tentu saja darah yang keluar jika terlalu banyak akan melemahkan kondisi ibunda. Keadaan ini bahkan bisa berujung kematian

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab. Solok tercatat ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe) pada masa kehamilannya. Diketahui tablet zat besi yang kerap dikonsumsi oleh ibu hamil dalam sepanjang tahun 2019 yakni Zatbesi (Fe1) yang dikonsumsi oleh 7431 pasien ibu hamil, dibanding dengan Tablet Zat Besi (Fe3) yang hanya dikonsumsi oleh 6319 pasien ibu hamil.

**Tabel. 5.6
JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET
ZAT BESI (FE)
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		Fe1	Fe2
1	Pantai Cermin	377	390
2	Lembah Gumanti	1315	1101
3	Hiliran Gumanti	330	314
4	Payung Sekaki	141	114
5	Tigo Lurah	217	164
6	Lembang Jaya	565	492
7	Danau Kembar	431	351
8	Gunung Talang	1084	830
9	Bukit Sundi	518	461
10	IX Koto Sungai Lasi	177	128
11	Kubung	1244	1162
12	X Koto Diatas	260	218
13	X Koto Singkarak	597	463
14	Junjung Sirih	175	131
	Jumlah	7431	6319

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.7 Jumlah Kelahiran, Lahir Hidup, Lahir Mati dan Keguguran

Potret angka kematian bayi menjadi salah satu hal guna mendorong kembali pelayanan prima dan maksimal untuk bayi dan ibu hamil. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

dipengaruhi oleh indikator-indikator morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan Ibu. Disamping itu, AKB juga berhubungan dengan angka pendapatan daerah per-kapita, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Jadi, AKB memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor pembangunan umum. Kasus kematian bayi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan.

Tabel. 5.7
JUMLAH KELAHIRAN, LAHIR HIDUP, LAHIR MATI,
KEGUGURAN DI PUSKESMAS KAB. SOLOK
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Bersalin	Keguguran	Lahir Hidup	Lahir Mati
1	Pantai Cermin	359	0	359	2
2	Lembah Gumanti	1160	30	1163	3
3	Hiliran Gumanti	314	7	309	5
4	Payung Sekaki	135	4	135	2
5	Tigo Lurah	203	2	198	5
6	Lembang Jaya	525	0	535	3
7	Danau Kembar	446	2	444	4
8	Gunung Talang	905	19	900	8
9	Bukit Sundi	426	2	427	2
10	IX Koto Sungai Lasi	170	0	173	2
11	Kubung	1141	14	1141	4
12	X Koto Diatas	284	4	282	2
13	X Koto Singkarak	548	17	547	2
14	Junjung Sirih	191	3	189	2
	Jumlah	6807	104	6802	46

Sumber: BPS Kab. Solok

5.8 Jumlah Balita dan Gizi Buruk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tercatat jumlah anak-anak yang menderita gizi buruk tahun 2019 yaitu 12 orang dan jumlah kelahiran sebanyak 30.502 orang. Gizi Buruk menjadi salah satu momok Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel. 5.8
JUMLAH BALITA DAN GIZI BURUK DI KABUPATEN
SOLOK
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Jumlah Balita	Balita Gizi Buruk
1	Pantai Cermin	1800	0
2	Lembah Gumanti	5657	3
3	Hiliran Gumanti	1499	2
4	Payung Sekaki	624	0
5	Tigo Lurah	766	0
6	Lembang Jaya	1819	0
7	Danau Kembar	2273	1
8	Gunung Talang	4074	1
9	Bukit Sundi	1951	0
10	IX Koto Sungai Lasi	726	0
11	Kubung	4898	1
12	X Koto Diatas	1173	2
13	X Koto Singkarak	2367	2
14	Junjung Sirih	875	0
	Jumlah	30502	12

Sumber: BPS Kab. Solok

5.9 Balita Yang Mendapatkan Imunisasi

Imunisasi merupakan suatu proses pembentukan kekebalan (antibodi) didalam tubuh terhadap antigen yang diberikan melalui mulut atau suntikkan. Sedangkan Vaksinisasi, merupakan tindakan pemberian vaksin (antigen) ke dalam tubuh baik melalui mulut atau suntikan, untuk merangsang pembentukan kekebalan (antibodi). Imunisasi dan vaksinisasi adalah untuk mencegah penyakit sesuai dengan antigen terhadap penyakit tertentu, misalnya campak.

Pada dasarnya imunisasi tujuannya untuk merangsang tubuh agar membentuk antibodi terhadap penyakit yg divaksinasi. Bisa atau tidaknya anak yang telah divaksinasi itu terserang penyakit tergantung antibodi yang terbentuk di dalam tubuh si anak. Jika saat imunisasi keadaan tubuh anak fit maka kemungkinan besar antibodi yang terbentuk bagus sehingga dapat menangkal terhadap virus atau bakteri yg menyerang tubuh si anak. Jika antibodi yang

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

terbentuk lemah maka kemungkinan anak akan terserang penyakit yang divaksinasi tersebut, namun gejala yang timbul akan lebih ringan dibandingkan dengan jika tidak diimunisasi, dan si anak akan terhindar dari komplikasinya.

Imunisasi merupakan hak untuk anak, oleh karenanya pemerintah setempat melalui dinas kesehatan untuk mendorong pemerataan imunisasi anak di daerahnya. Karena imunisasi merupakan hak anak untuk sehat dan tumbuh kembang.

Berkenaan tumbuh kembang anak perlunya perhatian terhadap sistem imun dan perlindungan tubuh bagi anak. Di Kabupaten Solok sendiri terdapat sejumlah 59.521 anak yang sudah mendapatkan imunisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
JUMLAH BALITA YANG MENDAPATKAN IMUNISASI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019

No	Kecamatan	BCG	DPT			Polio				Hepatitis	Campak
			1	2	3	1	2	3	4		
1	Pantai Cermin	295	315	361	356	294	365	337	330	337	345
2	Lembah Gumanti	1196	1195	1180	1211	1137	1143	1121	1160	1119	1100
3	Hiliran Gumanti	282	285	161	247	276	276	254	240	279	310
4	Payung Sekaki	131	132	131	130	131	138	132	132	125	119
5	Tigo Lurah	160	160	158	143	167	158	152	143	152	119
6	Lembang Jaya	480	469	468	472	480	469	470	472	477	469
7	Danau Kembar	366	380	350	325	330	345	302	274	382	297
8	Gunung Talang	924	927	889	845	920	917	886	841	869	883
9	Bukit Sundi	422	383	405	353	406	366	369	306	413	412
10	IX Koto Sungai Lasi	176	175	170	166	166	151	149	138	155	152
11	Kubung	1043	991	950	875	903	864	818	763	1069	813
12	X Koto Diatas	235	238	229	231	231	231	221	222	228	230

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

13	X Koto Singkarak	437	392	383	357	430	383	371	342	507	367
14	Junjung Sirih	156	138	126	106	161	141	125	120	150	113
	Jumlah	6303	6180	6170	5817	6032	5947	5707	5483	6262	5729

Sumber Data: BPS Kab. Solok

5.10 Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain lain.

HIV dan AIDS adalah masalah darurat global. Generasi muda termasuk anak-anak ternyata menjadi ancaman terbesar terkena infeksi yang berbahaya ini. Sebagian besar kasus HIV AIDS di Indonesia adalah usia 20-29 tahun dan sebagian anak sudah mulai terjangkit. HIV dan AIDS merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap pembangunan sosial ekonomi, stabilitas dan keamanan pada negara berkembang termasuk Indonesia. HIV dan AIDS telah menyebabkan kerteperukan masalah sosial dan ekonomi di tengah resesi dunia ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ada 12 orang penderita HIV/AIDS sepanjang tahun 2019. Secara kelompok umur, penderita HIV/AIDS didominasi pada kelompok usia 20-29 tahun, dengan jumlah 8 orang, usia 30-39 tahun 3 orang Sedangkan yang terendah ada usia 15-19 tahun 1 orang. Berikut perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Solok pada tahun 2019 menurut kelompok usia sebagai berikut:

Tabel. 5.10

**PENDERITA HIV/AIDS
TAHUN 2019**

No	Usia	Jumlah Kunjungan		
		L	P	Jumlah
1	1 Tahun	0	0	0
2	1-4 Tahun	0	0	0
3	5-14 Tahun	0	0	0
4	15-19 Tahun	0	1	1
5	20-29 Tahun	6	2	8
6	30-39 Tahun	2	1	3
7	40-49 Tahun	0	0	0
8	50-59 Tahun	0	0	0
9	>60 Tahun	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.11 Keluarga Berencana dan Pasangan Usia Subur (PUS)

Salah satu manfaat program KB adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan reproduksi di Indonesia. Hal ini juga akan berdampak positif bagi kesehatan ibu dan anak. Namun partisipasi masyarakat dalam ber-KB bergantung pada banyak faktor. Karenanya tidak setiap pasangan usia subur secara otomatis mengikuti program KB.

Tingkat kesadaran keluarga untuk berpartisipasi ber KB sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun masih diperlukan upaya-upaya untuk mengajak akseptor muda. Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada aspek sosial budaya. Ketidak seimbangan antara perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memperlambat proses pembangunan daerah. Karena itu program Keluarga Berencana (KB) terus digiatkan..

Peserta KB terdiri atas peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru, Jenis-jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB ini

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

bervariasi yaitu IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntik dan Pil. Kesertaan ber-KB aktif masih banyak didominasi oleh kaum perempuan, seperti IUD, MOW, Implant, Suntik dan Pil yaitu 45.261 sedangkan jumlah alat kontrasepsi yang digunakan oleh kaum pria terdiri dari MOP dan Kondom yaitu 787 Berikut kesertaan ber KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11

**JUMLAH USIA SUBUR DAN PESERTA /AKSEPTOR KELUARGA
BERENCANA AKTIF MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN
SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	JML PUS	Peserta KB Aktif Perempuan						Peserta KB Aktif Laki Laki		
			MOW	IUD	IMP	DTK	Pil	Jml	MOP	KDM	Jml
1	Pantai Cermin	4515	56	377	300	1833	566	3132	0	76	76
2	Lembah Gumanti	9912	119	360	883	5195	702	7259	2	0	2
3	Hiliran Gumanti	3684	31	4	1149	1274	212	2670	0	65	65
4	Payung Sekaki	1922	31	119	980	253	130	1513	2	14	16
5	Tigo Lurah	1875	0	53	616	377	198	1244	4	15	19
6	Lembang Jaya	4529	76	102	869	1407	242	2696	6	53	59
7	Danau Kembar	3930	52	6	1500	1502	202	3262	0	47	47
8	Gunung Talang	8347	183	614	1725	3751	626	6899	29	66	95
9	Bukit Sundi	3749	109	241	1484	980	188	3002	7	28	35
10	IX Koto Sungai Lasi	1705	88	61	439	437	116	1141	1	26	27
11	Kubung	8724	354	477	918	3782	563	6094	12	125	137
12	X Koto Diatas	2335	127	115	524	659	147	1572	0	26	26
13	X Koto Singkarak	4457	260	176	646	1660	244	2986	9	95	104
14	Junjung Sirih	2377	76	66	173	1234	242	1791	0	79	79
	Jumlah	62061	1562	2771	12206	24344	4378	45261	72	715	787

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Kesertaan ber-KB baru masih banyak didominasi oleh kaum perempuan, seperti IUD, MOW, Implant, Suntik dan Pil yaitu 5.577 sedangkan jumlah alat kontrasepsi yang digunakan oleh kaum pria

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

terdiri dari MOP dan Kondom yaitu 504 Berikut kesertaan ber KB baru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12

**JUMLAH PESERTA / AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
BARU MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki Laki		
		MOW	IUD	IMP	STK	Pil	Jml	MOP	KDM	Jml
1	Pantai Cermin	0	26	148	254	191	619	0	42	42
2	Lembah Gumanti	0	27	207	263	84	581	0	27	27
3	Hiliran Gumanti	0	2	138	186	51	377	0	27	27
4	Payung Sekaki	0	6	76	71	66	219	2	30	32
5	Tigo Lurah	0	1	49	60	94	204	0	24	24
6	Lembang Jaya	3	6	168	160	77	414	3	47	50
7	Danau Kembar	1	1	141	78	32	253	0	27	27
8	Gunung Talang	30	88	157	227	142	644	2	55	57
9	Bukit Sundi	0	15	143	66	129	353	0	27	27
10	IX Koto Sungai Lasi	2	2	68	71	39	182	0	21	21
11	Kubung	5	35	116	200	82	438	5	42	47
12	X Koto Diatas	0	14	49	429	116	608	0	41	41
13	X Koto Singkarak	0	24	104	254	141	523	3	58	61
14	Junjung Sirih	4	6	22	99	31	162	0	21	21
	Jumlah	45	253	1586	2418	1275	5577	15	489	504

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

5.12 Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus

Tabel 5.13

**JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KAB. SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan Kesehatan		
		Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik
1	Pantai Cermin	1	-	-
2	Lembah Gumanti	2	-	-
3	Hiliran Gumanti	1	-	-
4	Payung Sekaki	1	-	-
5	Tigo Lurah	1	-	-
6	Lembang Jaya	1	-	-
7	Danau Kembar	1	-	-

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

8	Gunung Talang	3	1	-
9	Bukit Sundi	1	-	-
10	IX Koto Sungai Lasi	1	-	-
11	Kubung	2	-	-
12	X Koto Diatas	2	-	-
13	X Koto Singkarak	1	-	-
14	Junjung Sirih	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

5.13 Jumlah Tenaga Medis Anak Berkebutuhan Khusus

**Tabel 5.14
JUMLAH TENAGA MEDIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(ABK) MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Wilayah	Jenis Pelayanan Kesehatan					
		Dokter Anak		Dokter Rehab Medis		Psikolog	
		L	P	L	L	L	P
1	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. solok

5.14 Jumlah Tenaga Terapis

**Tabel 5.15
JUMLAH TENAGA TERAPIS ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS (ABK) MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Wilayah	Jenis Pelayanan Kesehatan					
		Puskesmas		Rumah Sakit		Klinik	
		L	P	L	L	L	P
1	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Solok

BAB VI
PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN
PEMERINTAHAN

Prilaku keluarga dan peran serta setiap individu anggota keluarga akan membantu kita untuk mengerti tentang peranan wanita dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Pada struktur masyarakat yang turut berpengaruh peran wanita berbeda bagi setiap masyarakat (Hutajulu, 2004)

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita seringkali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan. Gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh Negara dan Undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga diakui disektor publik.

6.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Fakta menunjukkan, peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi penting, meskipun persentasenya masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi

perempuan anggota parlemen, telah berhasil mengundang secara formal dalam pasal 65 undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003.

Pasal tersebut adalah 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan "kuota" untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

- 1) *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.*
- 2) *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyakbanyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.*

Sementara Pasal 67 ayat (1) berbunyi :

"Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol".

Sehingga meskipun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik yang memiliki kuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya. Dilain pihak, perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, dalam hal ini, perempuan harus turut aktif dalam kepengurusan partai politik dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasi sebagai warga politik dengan tetap dalam koridornya sebagai perempuan.

Berdasarkan data Kabupaten Solok memperlihatkan jumlah anggota dewan perwakilan daerah menurut partai politik dan jenis kelamin. Keterwakilan perempuan dalam partai politik yang menjadi anggota dewan perwakilan daerah perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, bahkan ada 8 partai dari 10 partai politik yang tidak ada keterwakilan perempuannya. Dari total

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

anggota dewan perwakilan daerah sebanyak 35 orang hanya 3 orang saja keterwakilan perempuannya.

Keterwakilan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Solok nampak dari jumlah perempuan yang dicalonkan oleh partai politik. Dari keseluruhan partai politik yang memiliki anggota DPRD di Kabupaten Solok, partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD yaitu sebanyak 2 orang dan partai Demokrat 1 orang.

Tabel 6.1
JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT PARTAI
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019

No	Partai	Anggota DPRD Kab. Solok		
		L	P	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	2	2	4
2	Partai Persatuan Pembangunan	3		3
3	Partai Amanat Nasional	6		6
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	6		6
5	Partai Demokrat	3	1	4
6	Partai Keadilan Sejahtera	4		4
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2		2
8	Partai Nasional Demokrat	4		4
9	Partai Hati Nurani Rakyat	2		2
10	Partai Bulan Bintang	-		-
	Jumlah	32	3	35

Sumber: BPS Kabupaten Solok

6.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif.

Data partisipasi perempuan di lembaga yudikatif meliputi data jaksa, hakim dan polisi. Terdapat 26 jaksa yang terdiri dari 9 jaksa perempuan.

Tabel 6.2
JUMLAH JAKSA MENURUT JENIS JABATAN DAN
JENIS KELAMIN
TAHUN 2019

No	Jenis Jabatan Jaksa	Jumlah Jaksa		
		L	P	Jumlah
1	Fungsional	3	7	10
2	Struktural	0	0	0
	Eselon I	0	0	0
	Eselon II/a	0	0	0
	Eselon II/b	0	0	0
	Eselon III/a	1	0	1
	Eselon III/b	0	0	0
	Eselon IV	7	0	7
	Eselon V	6	2	8
	Jumlah	17	9	26

Sumber: Kejaksaan Negeri Solok

Data di Kejaksaan Negeri Solok tahun 2018 menunjukkan bahwa perempuan kini dapat berperan publik sebagai jaksa baik sebagai fungsional maupun struktural. Namun terlihat bahwa perempuan dalam jabatan jaksa fungsional lebih banyak dibandingkan perempuan pada jabatan structural. Jaksa fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*). Dari sisi structural jaksa, jaksa perempuan sudah ada keterwakilan hanya eselon V sebanyak 2 orang namun tidak ada yang pada Eselon I,II,III, dan IV hanya saja masih banyak posisi diisi oleh laki-laki.

Tabel 6.3
JUMLAH HAKIM MENURUT JENIS JABATAN DAN JENIS
KELAMIN
TAHUN 2018

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah Hakim		
		L	P	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Koto Baru	1	0	0

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

2	Wakil Ketua Pengadilan Koto Baru	0	0	0
3	Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru	2	2	4
	Jumlah	3	2	5

Sumber: Pengadilan Koto Baru,

Data di Kejaksaan Negeri Koto Baru tahun 2018 menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai hakim di Kabupaten Solok sebanyak 2 orang. Sementara jumlah polisi tahun 2019 berdasarkan data menunjukkan bahwa peran perempuan di kepolisian menurut pangkat sebanyak 20 orang dan laki laki 326 orang di Kabupaten Solok.

**Tabel 6.4
JUMLAH POLISI MENURUT JENIS KEPANGKATAN DAN JENIS
KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Jenis Kepangkatan	Polres			Polsek		
		L	K	Jml	L	P	Jml
1	AKBP	1	-	1	-	-	-
2	KOMPOL	4	-	4	-	-	-
3	AKP	5	-	5	1	-	1
4	IPTU	16	-	16	11	-	11
5	IPDA	15	-	15	8	-	8
6	AIPTU	6	-	6	14	-	14
7	AIPDA	5	-	5	21	-	21
8	BRIPKA	36	4	40	58	1	59
9	BRIGADIR	38	3	41	32	-	32
10	BRIPTU	20	7	27	8	-	8
11	BRIPDA	23	5	28	4	-	4
12	ABRIP	-	-	-	-	-	-
13	ABRDA	-	-	-	-	-	-
14	BHARKA	-	-	-	-	-	-
15	BHARATU	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	169	19	188	157	1	158

Sumber: BPS Kab. Solok

6.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Peran perempuan di sektor pemerintahan di Kabupaten Solok salah satunya digambarkan dari banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang bekerja di Pemkab Solok. Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2019 dari total PNS sebanyak 5.647 orang, sebanyak 3.727 orang adalah PNS perempuan, sisanya sebanyak 1.920 orang adalah PNS laki-laki.

Tabel 6.5

**JUMLAH PNS DAERAH MENURUT GOLONGAN RUANG
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Golongan Ruang Kepangkatan PNS	Jumlah PNS		
		L	P	Jumlah
1	I-a	3	0	3
2	I-b	3	0	3
3	I-c	9	1	10
4	I-d	11	0	11
5	Golongan I	26	1	27
6	II-a	51	14	65
7	II-b	107	150	257
8	II-c	119	212	331
9	II-d	91	83	174
10	Golongan II	368	459	827
11	III-a	205	536	741
12	III-b	247	786	1033
13	III-c	212	436	648
14	III-d	250	413	663
15	Golongan III	914	2171	3085
16	IV-a	443	722	1165
17	IV-b	148	371	519
18	IV-c	20	3	23
19	IV-d	1	0	1
20	IV-e	0	0	0
21	Golongan IV	612	1096	1708

Sumber: BKPSDM Kab. Solok

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

Selain dilihat dari jumlah PNS perempuan di Pemkab Solok, Peran perempuan di sektor pemerintahan dapat juga dilihat dari banyaknya PNS perempuan yang menjadi pejabat struktural. Pada tahun 2019 jabatan eselon II dijabat oleh perempuan yaitu 3 orang, 25 orang PNS perempuan menjabat eselon III, dan pejabat eselon IV perempuan berjumlah 172 orang, sisanya fungsional 3.527 orang.

Tabel 6.6

**JUMLAH PNS DAERAH MENURUT JENIS JABATAN
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		L	P	Jumlah
1	Fungsional Umum	761	577	1338
2	Fungsional Tertentu	794	2950	3744
3	Eselon I	0	0	0
4	Eselon II	28	3	31
5	Eselon III	106	25	131
6	Eselon IV	231	172	403
7	Eselon V	0	0	0

Sumber: BKPSDM

Data tersebut menunjukkan pejabat struktural perempuan yang menduduki posisi eselon II,II dan IV lebih rendah dibandingkan pejabat struktural laki-laki.

Tabel 6.7

**JUMLAH TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KAB. SOLOK
TAHUN 2019**

No	Wilayah	Pengurus dan Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan		Jumlah
		L	P	
1	Kabupaten Solok	7	0	0

Sumber: BKPSDM

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum ada yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki dan semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan menurut UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Berikut keterwakilan perempuan menjabat sebagai camat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.8
JUMLAH CAMAT MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Gunung Talang	1	
2	Kubung		1
3	X Koto Singkarak	1	
4	Junjung Sirih	1	
5	X Koto Diatas		1
6	IX Koto Sungai Lasi	1	
7	Bukit Sundi	1	
8	Payung Sekaki	1	
9	Danau Kembar	1	
10	Lembang Jaya	1	
11	Lembah Gumanti	1	
12	Hiliran Gumanti	1	
13	Pantai Cermin	1	
14	Tigo Lurah	1	

Sumber: BKPSDM Kab. Solok

Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat/ walinagari jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dari 14 kecamatan di Kabupaten solok posisi camat perempuan hanya 2 orang dan jumlah laki-laki ada 12 orang.

6.4 Organisasi Perempuan dan Masyarakat

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang bersifat perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Banyak dan beragamnya organisasi Perempuan di Kabupaten Solok menjadi salah satu kekuatan yang dahsyat dalam mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Solok. Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

besar. Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, dapat memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Dan melalui pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Solok.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih dan lebih optimal.

Salah satu bentuk pemberdayaan dan kepedulian pemerintah dalam pemberdayaan perempuan yaitu melibatkan organisasi dalam beberapa kegiatan yang didanai dengan anggaran pemerintah daerah, organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok pada Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yaitu Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Keluarga Anggota (IKA) DPRD, dan Dharmawanita Persatuan (DWP) Kabupaten Solok.

Tabel. 6.9

DATA TERKAIT ORGANISASI PEREMPUAN DI KABUPATEN SOLOK

No	Nama Organisasi
1	GOW Kab. Solok
2	Dharmawanita Persatuan Kabupaten Solok
3	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Solok
4	Aisyiah

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

5	Kualisi Perempuan Indonesia (KPI)
6	Perempuan Wiraswasta Indonesia
7	HWK
8	IWAPI
9	Dharmayukti Karini
10	Dharmawanita Persatuan Kementerian Agama
11	Dharmawanita Persatuan Balitbu Tropika
12	Bundo Kanduang
13	IKA (Ikatan Keluarga Anggota)
14	Tata Boga
15	Dharmawanita Persatuan BPTP
19	Alhidayah
20	Perwati
21	Persit
22	Bhayangkari
23	Adhiyaksa Dharma Karini
24	Kaukus Perempuan Golkar
25	KWAFERI
26	Himpunan Wanita Muslim
27	Wanita Kosgoro

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

6.5 Pengurus LPM dan BPN se Kab. Solok

Berdasarkan data DPMN Kab. Solok menunjukkan Keterwakilan perempuan sebagai pengurus dan anggota LPM dan BPN di Kab. Solok tercatat sekitar 35 % atau sebanyak 199 orang sedangkan laki-laki sebanyak 65% atau sejumlah 525 orang dari total secara keseluruhan 724 orang sebagai berikut:

**JUMLAH LPM NAGARI MENURUT JENIS KELAMIN DI
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin		Jmlh
		L	P	
1	Kecamatan Bukit Sundi	6	1	7
	1. Nag. Bukit Tandang	6	2	8
	2. Nag. Dilam	3	4	7
	3. Nag. Kinari	9	1	10
	4. Nag. Muaro Paneh	3	4	7
	5. Nagari Parambahan	4	2	6

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

2	Kecamatan Danau Kembar	6	1	7
	6. Nag. Kampung Batu Dalam	3	4	7
	7. Nag. Simpang Tjng.Nan IV	3	4	7
3	Kecamatan Gunung Talang	7	1	8
	8. Nag. Aie Batumbuk	3	4	7
	9. Nag. Batang Barus	8	1	9
	10. Nagari Cupak	6	2	8
	11. Nagari Jawi-Jawi	3	4	7
	12. Nag. Koto Gadang Guguk	5	2	7
	13. Nag. Koto Gaek Guguk	3	4	7
	14. Nag. Sungai Janiah	8	3	11
	15. Nag. Talang	10	3	13
4	Kecamatan Hiliran Gumanti	7	0	7
	16. Nag. Sarik Alahan Tigo	7	2	9
	17. Nag. Sungai Abu	6	1	7
	18. Nag. Talang Babungo	10	0	10
5	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	6	1	7
	19. Nag. Bukit Bais	6	3	9
	20. Nag. Guguak Sarai	4	5	9
	21. Nag. Indudur	7	2	9
	22. Nagari Koto Laweh	3	4	7
	23. Nag. Pianggu	3	3	6
	24. Nag. Siaro-aro	7	3	10
	25. Nag. Sungai Durian	7	2	9
	26. Nag. Sungai Jambua	7	8	15
	27. Nag. Taruang-Taruang	7	2	9
6	Kecamatan Junjung Sirih	5	2	7
	28. Nag. Muaro Pingai	9	4	13
	29. Nag. Paninggahan	7	3	10
7	Kecamatan Kubung	7	0	7
	30. Nag. Gantung Ciri	7	2	9
	31. Nag. Gaung	11	2	13
	32. Nag. Koto Baru	9	2	11
	33. Nag. Koto Hilalang	5	2	7
	34. Nag. Panyakalan	4	3	7
	35. Nag. Saok Laweh	6	11	17
	36. Nag. Selayo	5	2	7
	37. Nag. Tanjung Bingkung	6	3	9
8	Kecamatan Lembah Gumanti	6	1	7
	38. Nag. Aie Dingin	5	2	7
	39. Nag. Alahan Panjang	6	3	9
	40. Nag. Salimpek	4	3	7
	41. Nag. Sungai Nanam	5	2	7
9	Kecamatan Lembang Jaya	11	2	13
	42. Nag. Batu Bajanjang	11	2	13
	43. Nag. Batu banyak	8	1	9

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

	44. Nag. Koto Anau	4	3	7
	45. Nag. Koto Laweh	5	2	7
	46. Nag. Limau Lunggo	7	0	7
	47. Nag. Selayo Tanang	7	2	9
10	Kecamatan Pantai Cermin	6	2	8
	48. Nag. Lolo	9	0	9
	49. Nag. Surian	7	2	9
11	Kecamatan Payung Sekaki	10	3	13
	50. Nagari Aie Luo	5	2	7
	51. Nag. Sirukam	6	1	7
	52. Nag. Supayang	5	2	7
12	Kecamatan Tigo Lurah	5	2	7
	53. Nag. Batu Bajanjang	5	2	7
	54. Nag. Garabak data	9	1	10
	55. Nag. Rangkihah Luluah	6	1	7
	56. Nag. Simanau	8	1	9
	57. Nag. Tanjung Balik Sumiso	4	3	7
13	Kecamatan X Koto Diatas	6	1	7
	58. Nag. Bukit Kandung	7	2	9
	59. Nag. Katialo	5	2	7
	60. Nag. Kunci	6	1	7
	61. Nag. Labuah Panjang	7	2	9
	62. Nag. Paninjauan	5	2	7
	63. Nag. Pasilihan	6	1	7
	64. Nag. Sibarambang	6	1	7
	65. Nag. Sulit Aie	5	2	7
	66. Nag. Tanjung Balik	5	2	7
14	Kecamatan X Koto Singkarak	2	5	7
	67. Nag. Aripin	3	4	7
	68. Nag. Kacang	10	1	11
	69. Nag. Koto Sani	4	1	5
	70. Nag. Saniing Baka	5	2	7
	71. Nag. Singkarak	6	1	7
	72. Nag. Sumani	4	3	7
	73. Nag. Tanjung Alai	5	2	7
	74. Nag. Tikalak	6	1	7
	Jumlah	525	199	724

Sumber: DPMN Kab. Solok

BAB VII

PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian.

Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur/sedang mencari pekerjaan.

7.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang masuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (Pensiun, cacat dan sebagainya).

**Tabel 7.1
PARTISPASI ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN SOLOK
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Angkatan Kerja	104296	79009	183205
2	Bekerja	101004	73776	174780
3	Pengangguran Terbuka	3292	5233	8525
4	Bukan Angkatan Kerja	22684	53664	76384
5	Sekolah	11687	10850	22537
6	Mengurus Rumah Tangga	3497	37616	41113
7	Lainnya	7500	5198	12698
	Jumlah	1126980	132673	259653
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82,15	59,55	70,60
	Tingkat Pengangguran	3,16	6,62	4,62

Sumber : BPS sudah diolah

Berdasarkan data terlihat bahwa jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Solok berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 104.296 orang sedangkan perempuan sebanyak 79.009 orang. Jika dipersentasekan partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Solok adalah sebesar 59,55 persen sedangkan partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 82,15 persen. Hal ini dimungkinkan lebih banyak perempuan Kab. Solok di usia kerja yang kegiatan utamanya untuk mengurus rumah tangga, bersekolah atau kegiatan lainnya.

Fenomena ini terjadi karena pada umumnya perempuan lebih dituntut sebagai ibu rumah tangga yang berperan sebagai pengasuh anak-anaknya. Kalaupun mereka bekerja tetap dituntut untuk berperan ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan perekonomian, mereka juga dituntut untuk mengurus rumah tangga. Selain itu di dalam masyarakat juga masih terdapat anggapan bahwa pencari nafkah utama dalam rumah tangga adalah laki-laki.

7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat ini terjadi akibat dari ketidak seimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut berakibat terhadap penyerapan angkatan kerja relative terbatas dan tidak proporsional, sehingga angka pengangguran masih tinggi. Meski kenyataan ini sulit dihindari, namun bukan tak ada jalan keluarnya. Jika masyarakat bisa digerakkan untuk lebih mandiri dan kreatif dalam membuka peluang usaha, setidaknya masalah pengangguran ini bisa diminimalkan. Dampak sosial dan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran memang tidak bisa disepelekan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah bagaimana cara menanggulangi masalah pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019 pada tabel 7.1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia kerja perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki yaitu TPT perempuan 5.233 orang dan laki laki 3.292 orang jika dipresentasikan tingkat pengangguran di Kab. Solok adalah 6,62 persen perempuan dan laki laki 3, 16 persen.

7.3 Penduduk 15 Tahun keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok jika dilihat menurut sektor lapangan usaha penduduk perempuan Kabupaten Solok paling banyak bekerja di sektor jasa pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, hanya sebagian persen yang bekerja di jasa kemasyarakatan, jasa sosial, jasa perorangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa lainnya, industri pengolahan, dan lainnya. Jika dilihat dai perbandingan lebih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.2
PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT
LAPANGAN PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	54670	41433	96103
2	Industri Pengolahan	4790	3579	8369
3	Perdagangan besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	19765	17780	37545
4	Jasa Kemasyarakatan, Jasa Sosial, Jasa Perorangan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Lainnya	3742	8915	12657
5	lainnya (pertambangan, penggalian, kontruksi, listrik, gas, air, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha, persewaan bangunan, tanah, jasa perusahaan)	18037	2940	20977
	Jumlah	101400	74647	175651

Sumber : BPS Kab. Solok

7.4 Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

**Tabel 7.3
PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT
STATUS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Berusaha Sendiri	20707	10942	31649
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak bayar	30946	10642	41238
3	Berusaha buruh tetap/ buruh dibayar	4670	1074	5744
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	21154	13890	35044
5	Pekerja bebas	15690	11441	27131
6	Pekerja Keluarga/ tak dibayar	8287	25787	34074
	Jumlah	101004	73776	174780

Sumber : BPS Kab. Solok

7.5 Pencari Kerja Terdaftar, Dihapuskan Dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 7.4
JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekolah Dasar	5	5	10
2	Sekolah Menengah Pertama	1	16	17
3	Sekolah Menengah Atas	416	481	897
4	Diploma I/II/III/Akademi	36	103	139
5	Universitas	168	397	565
	Jumlah	626	1002	1628

Sumber : BPS Kab. Solok

**Tabel 7.5
JUMLAH PENCARI KERJA DIHAPUSKAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekolah Dasar	10	4	14
2	Sekolah Menengah Pertama	11	16	27
3	Sekolah Menengah Atas	470	480	950
4	Diploma I/II/III/Akademi	143	322	465
5	Universitas	451	874	1325
	Jumlah	1085	1696	2781

Sumber : BPS Kab. Solok

**Tabel 7.6
JUMLAH PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekolah Dasar	1	2	3
2	Sekolah Menengah Pertama	2	20	22
3	Sekolah Menengah Atas	16	58	74
4	Diploma I/II/III/Akademi	5	8	13
5	Universitas	17	35	52
	Jumlah	41	123	164

Sumber : BPS Kab. Solok

7.6 Pencari Kerja Teraftar, Dihapuskan Dan Ditempatkan Menurut Umur

**Tabel 7.7
JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	15 – 19	160	245	405
2	20 – 29	437	665	1102
3	30 – 44	25	89	114
4	45+	4	3	7
	Jumlah	626	1002	1628

Sumber : BPS Kab. Solok

**Tabel 7.8
JUMLAH PENCARI KERJA DIHAPUSKAN MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	15 – 19	124	154	278
2	20 – 29	789	1223	2012
3	30 – 44	168	314	482
4	45+	4	5	9
	Jumlah	1086	1696	2781

Sumber : BPS Kab. Solok

**Tabel 7.9
JUMLAH PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN MENURUT
UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	15 – 19	3	12	15
2	20 – 29	32	73	105
3	30 – 44	5	36	41
4	45+	1	2	3
	Jumlah	41	123	164

Sumber : BPS Kab. Solok

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

7.7 Pencari Kerja Terdaftar, Yang Ditempatkan Dan Dihapuskan Menurut Klasifikasi Jabatan

**Tabel 7.10
JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT
KLASIFIKASI JABATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Tenaga Profesional Teknisi dan tenaga Ybdi	152	173	325
2	Teknisi dan Kelompok Pejabat Sejenis	104	136	240
3	Penata Usaha	6	35	41
4	Tenaga Usaha Jasa dan Penjualan Dagangan Toko	146	200	346
5	Pekerjaan Keterampilan Bidang Pertanian	2	1	3
6	Pekerja Kasar Terampil dan Sejenisnya YBDL	13	50	63
7	Operator dan Perakit Mesin dan Mesin Pabrik	150	380	530
5	Pekerja Kasar	53	27	80
	Jumlah	626	1002	1628

Sumber : BPS Kab. Solok

**Tabel 7.11
JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT
KLASIFIKASI JABATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jmlh
		L	P	
1	Tenaga Profesional Teknisi dan tenaga Ybdi	56	146	202
2	Teknisi dan Kelompok Pejabat Sejenis	435	349	784
3	Penata Usaha	61	46	107
4	Tenaga Usaha Jasa dan Penjualan Dagangan Toko	294	354	648
5	Pekerjaan Keterampilan Bidang Pertanian	48	139	187

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

6	Pekerja Kasar Terampil dan Sejenisnya YBDL	2	62	64
7	Operator dan Perakit Mesin dan Mesin Pabrik	185	340	525
5	Pekerja Kasar	4	260	264
	Jumlah	1085	1696	2781

Sumber : BPS Kab. Solok

**Tabel 7.12
JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT
KLASIFIKASI JABATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019**

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jmlh
		L	P	
1	Tenaga Profesional Teknisi dan tenaga Ybdi	-	-	-
2	Teknisi dan Kelompok Pejabat Sejenis	21	25	46
3	Penata Usaha	-	-	-
4	Tenaga Usaha Jasa dan Penjualan Dagangan Toko	-	-	-
5	Pekerjaan Keterampilan Bidang Pertanian	-	-	-
6	Pekerja Kasar Terampil dan Sejenisnya YBDL	-	20	20
7	Operator dan Perakit Mesin dan Mesin Pabrik	20	78	98
5	Pekerja Kasar	-	-	-
	Jumlah	1085	1696	2781

Sumber : BPS Kab. Solok

7.8 Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)

Tabel 7.13

**JUMLAH UMK MENURUT JENIS KELAMIN DI KAB. SOLOK
TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pantai Cermin	361	390	751
2	Lembah Gumanti	589	426	1015

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

3	Hiliran Gumanti	289	314	603
4	Payung Sekaki	166	195	361
5	Tigo Lurah	186	140	326
6	Lembang Jaya	455	604	1059
7	Danau Kembar	232	320	552
8	Gunung Talang	803	1630	2433
9	Bukit Sundi	378	523	901
10	IX Koto Sungai Lasi	255	325	580
11	Kubung	829	1352	2181
12	X Koto Diatas	350	525	875
13	X Koto Singkarak	641	923	1564
14	Junjung Sirih	114	383	497
	TOTAL	5648	8050	13698

Sumber: BPS Kab. Solok

BAB VIII

PROFIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. .

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

1. Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

3. Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PP Tahun 1993).

Isu kekerasan pada perempuan merupakan salah satu isu kritis dalam upaya perlindungan perempuan, selama bertahun-tahun, upaya untuk menanggulangi kekerasan pada perempuan telah banyak dilakukan, namun kejadian kekerasan pada perempuan masih saja terjadi.

Salah satu isu kritis dalam perlindungan perempuan serta dalam rangka menyusun program perlindungan perempuan yang komprehensif di Kabupaten Solok, maka diperlukan data dasar yang memadai terkait potret kekerasan pada perempuan. Oleh karenanya, berikut ini disajikan data terkait kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Solok.

Tabel 8.1
JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT KELOMPOK UMUR DI KAB.SOLOK TAHUN 2019

No	Wilayah	Jenis Kelamin				Jmlh
		Perempuan		Laki Laki		
		Anak (<18tahun)	Dewasa (>18Tahun)	Anak (<18tahun)	Dewasa (>18Tahun)	
1	Kab. Solok	21	18	20	4	63
	Jumlah	21	18	20	4	63

Sumber data : Polres, P2TP2A Kab. Solok, Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Berdasarkan data kasus perempuan dan anak sepanjang tahun 2019 tercatat 63 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok yang ditangani oleh Dinas PPKBP3A Kab. Solok, UPPA Polres Solok, P2TP2A Kab. dan Peksos.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan

atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), adapun yang menjadi korban adalah suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga .Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual yang meliputi :
 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
 3. Penelantaran rumah tangga, yang meliputi ;
 - Penelantaran kehidupan orang lain atau tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
 - Membatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

**Tabel 8.2
JUMLAH KASUS PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN
DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**

No	Jenis Kekerasan	Jenis Kekerasan		
		Perempuan	Laki- Laki	Jmlh
1.	KDRT/ Kekerasan Fisik	15	1	16
2.	Seksual	1	0	1
3.	Pencurian	0	3	3
4.	Lainnya (Pembunuhan, Penggelapan, Melarikan Orang)	2	0	2
	Jumlah	18	4	22

Sumber data : Dinas DPPKBP3A Kab. Solok, UPPA Polres Solok, P2TP2A, Peksos

Berdasarkan data tercatat 22 kasus kekerasan usia diatas 18 tahun yaitu 18 kasus perempuan dan 4 kasus laki-laki. Kasus yang terjadi berupa KDRT/Kekerasan Fisik 15 kasus, Seksual 1 kasus, pencurian 3 kasus, dan lainnya 2 kasus.

KDRT sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya, namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah KDRT sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain/ pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

8.2 Kekerasan Terhadap Anak

Pada dasarnya berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menempatkan Anak juga sebagai salah satu subyek yang dilindungi dalam Undang-Undang ini tidak menghapus keberadaan Undang-Undang Perlindungan anak yang telah ada. Namun jika dicermati, maka UU KDRT ini memberikan perlindungan yang lebih bagi anak pada beberapa hal, terutama bagi anak yang mendapatkan perlakuan

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

kekerasan baik secara fisik maupun psikis oleh orang yang ada dalam rumah tangga si anak, masih ditambah lagi anak mendapatkan hak-hak lain untuk mendapatkan perlindungan bukan hanya dari Pemerintah namun juga dari Masyarakat. Oleh karenanya patut dibahas hal-hal yang lebih memberi perlindungan kepada anak dengan berlakunya Undang-Undang KDRT ini. Rumah Tangga Anak terdiri dari :

1. Orang tua si anak (baik orang tua kandung maupun orang tua angkat atau orang tua tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak, atau orang tua si anak (dalam hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga si anak).
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga atau pengasuh si anak dan menetap dalam rumah tangga si anak tersebut.

Tabel 8.3

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
(USIA < 18) MENURUT JENIS KELAMIN DI
KAB.SOLOK
TAHUN 2019**

No	Wilayah	Jenis Kelamin		Jmlh
		Perempuan	Laki Laki	
1	Kab. Solok	21	20	41
	Jumlah	21	20	41

Sumber data : Polres, P2TP2A Kab. Solok, Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Berdasarkan data sepanjang tahun 2019 tercatat 41 kasus terhadap anak yang terdiri atas 21 kasus anak perempuan dan 20 Kasus anak laki yang ditangani oleh Dinas PPKBP3A, UPPPA Polres Solok, P2PTP2A Kab. Solok, Peksos.

Dalam hal seorang anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ia berhak melapor kepada polisi, apabila si anak tidak dapat melapor, orang lain dalam rumah tangga si anak, bahkan orang

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

lain yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melindungi si anak.

Perlindungan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya maupun perlindungan yang didapatkan berdasar penetapan pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban secara medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Didampingi oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
5. Pelayanan bimbingan rohani

Tabel 8.4
JUMLAH KASUS PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN
DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019

No	Jenis Kekerasan	Jenis Kekerasan		
		Perempuan	Laki- Laki	Jmlh
1.	KDRT/ Kekerasan Fisik	2	13	15
2.	Seksual	18	0	18
3.	Pencurian	0	7	7
4.	Lainnya (Pembunuhan, Penggelapan, Melarikan Orang)	1	0	1
	Jumlah	21	20	41

Sumber data : Dinas DPPKBP3A Kab. Solok, UPPA Polres Solok, P2TP2A, Peksos

Berdasarkan data menurut jenis kekerasan yang ditangani terhadap anak yaitu kasus KDRT/Kekerasan Fisik ada 2 kasus anak perempuan dan 13 kasus laki-laki, 18 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, 7 kasus Pencurian, dan 1 kasus lainnya. Dari 18 kasus kekerasan seksual terhadap anak pelaku kekerasan di dominasi oleh orang-orang dari lingkungan terdekat atau masih ada hubungan pertalian darah/kekerabatan seperti (ayah kandung, ayah

tiri, paman, saudara laki-laki, tetangga) dan lainnya yang disebabkan dengan berbagai faktor yang dilakukan dilingkungan rumah tangga dan tempat lainnya.

Kasus kekerasan pada anak banyak terjadi pada kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Tingginya angka kekerasan terhadap anak perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak sebagai generasi penerus masa depan.

“Pohon yang kuat tidak tumbuh dari tunas yang lemah, lindungi anak sejak dini, agar kelak tumbuh menjadi generasi bangsa yang kuat dan mandiri.”

8.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)

**Tabel 8.5
KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT UMUR DI
KAB.SOLOK
TAHUN 2019**

No	Wilayah	Usia				TOTAL	
		0 - 18 tahun (Anak)		> 18 Tahun			
		L	P	L	P	L	P
1	Kab. Solok	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah Kepolisian

8.3.1 Layanan Korban Perdagangan Orang

**Tabel 8.6
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT
JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN DI KAB.SOLOK
TAHUN 2019**

No	Jenis Pelayanan	Jmlh
1	Pendataan/ Identifikasi	Nihil
2	Layanan Psikologis	Nihil
3	Rehabilitasi Medis	Nihil
4	Rehabilitasi Sosial	Nihil

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

5	Bantuan Hukum	Nihil
6	Pemulangan Reintegrasi	Nihil
7	Reintegrasi Sosial	Nihil

Sumber data : UPPA Polres

8.3.2 Proses Hukum Korban Perdagangan Orang

**Tabel 8.7
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT
PROSES HUKUM KASUS DI KAB.SOLOK
TAHUN 2019**

No	Tingkat Proses Hukum	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Penyidikan	Nihil	Nihil
2	Penuntutan	Nihil	Nihil
3	Putusan Pengadilan	Nihil	Nihil

Sumber data : UPPA Polres

Berdasarkan data yang tercatat dan ditangani oleh unit PPPA Polres Solok dan Dinas PPKBP3A Kab. Solok sepanjang tahun 2019 belum ditemukan adanya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

8.3.3 Kelembagaan dan Kebijakan Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang

**Tabel 8.8
GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERATASAN
PERDAGANGAN ORANG DI KAB.SOLOK
TAHUN 2019**

No	Wilayah	Gugus Tugas/Kebijakan terkait TPPO									
		Gugus Tugas		Rencana Aksi Daerah PP-TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/SE)		Koordinasi Dengan Daerah lain	
		ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Kab. Solok	√		√		√		√		√	

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

8.3.4 Hambatan dan Anggaran Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang

**Tabel 8.9
GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN
PERDAGANGAN ORANG DI KAB.SOLOK
TAHUN 2019**

N O	Wilayah	Gugus Tugas	Rencana Aksi Daerah TPPO	Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Anggaran			Ket
		Hambatan	Hambatan	Hambatan	Jmlh	Sumber	Hambatan	
1	Kab. Solok	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

BAB IX

PROFIL DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN

8.1 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

8.1.1 Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat menciptakan keamanan, ketenangan, kesejahteraan dan jaminan kepada masyarakat untuk dapat hidup layak dimanapun mereka berada. Pembangunan manusia merupakan suatu proses pengentasan kemiskinan untuk jangka panjang. Pembangunan manusia dilakukan dengan harapan dalam kurun beberapa waktu kedepan akan tercipta manusia-manusia yang kuat dan tangguh, baik secara fisik maupun mental, dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Keberhasilan pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili dimensi kesehatan; harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dalam dimensi pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (dimensi pembangunan).

Angka IPM dibentuk berdasarkan indikator indikator pembentuk komponennya, oleh sebab itu sebelum melakukan analisis IPM perlu terlebih dahulu diketahui perkembangan indikator indikator tersebut di Kabupaten Solok. Indikator pertama Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Solok tahun

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

2019 mencapai 68,34 tahun. Hal ini berarti bahwa peluang untuk bertahan hidup penduduk hingga usia 68 – 70 tahun.

Untuk indikator kedua dimensi pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Solok sebesar 13,03 tahun yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tujuh tahun di masa mendatang adalah 13,03 tahun. Indikator dimensi pendidikan selanjutnya adalah Rata-rata Lama Sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Solok adalah 7,85 tahun.

Indikator yang ketiga adalah indikator Pengeluaran yakni menggunakan Angka Pengeluaran Perkapita disesuaikan. Pengeluaran perkapita disesuaikan di Kabupaten Solok sebesar Rp 10,309 ribu. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Tabel 8.10
Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang Indeks
Pembangunan Gender Kabupaten Solok
Tahun 2019

No	Indikator	Hasil Kajian
1	Angka Harapan Hidup	68,34
2	Harapan Lama Sekolah	13.03
3	Rata-rata Lama Sekolah	7,85
4	Pengeluaran Perkapita	10,309
	Indeks Pembangunan Manusia	69,08

Sumber data: BPS, sudah diolah

IPM Kabupaten Solok dalam lima tahun terakhir sebesar 69,08, jika dibandingkan dengan IPM provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda sebesar 69,98 dan sudah mendekati angka IPM national yaitu 69,55.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian pembangunan pada umumnya dinyatakan dengan adanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya atau sebaliknya. Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian

pembangunan. Indikator Pembangunan Manusia yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Komponen penghitungan IPG didasarkan kepada pendidikan dan ekonomi. Pendidikan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, ekonomi diwakili oleh data tenaga kerja. Selisih antara angka IPM dan angka IPG dapat dimaknai sebagai “bias gender” dalam pembangunan. Konkretnya, apabila angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender.

Tabel 8.11
Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang Indeks
Pembangunan Gender Kabupaten Solok
Tahun 2019

No	Indikator	Hasil Kajian
	Indeks Pembangunan Gender	96,17

Sumber data: BPS Provinsi, sudah diolah

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen penghitungan IDG adalah kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan baik dalam politik (keterwakilan perempuan di parlemen) maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kesamaan kontribusi secara ekonomi dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial.

Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai IPM dan IPG semakin tahun semakin meningkat, namun dibalik semua itu masih terjadi kesenjangan atau ketidaksetaraan gender yang dapat dilihat dari selisih (gap) yang tercipta antara nilai IPM dan IPG. Salah satu upayanya adalah berbuat maksimal untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, proses pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2020

unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan indeks pemberdayaan gender (IDG).

8.1.2 Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender

Tabel 8.12
Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah yang Responsif Gender Kabupaten Solok tahun 2019

No	Wilayah	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No. 6 tahun 2015	Bupati Solok
2		Perbub pedoman pelaksanaan PUG di lingkungan Pemkab. Solok	No. 24 tahun 2014	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

8.1.3 Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Tabel 8.13
Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Kabupaten Solok Tahun 2019

No	Wilayah	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No.6 Tahun 2015	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

8.1.4 Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Tabel 8.14
Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Kabupaten Solok tahun 2019

No	Wilayah	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No.6 Tahun 2015	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

8.1.5 Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan

**Tabel 8.15
Lembaga Yang Melayanani Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Solok
tahun 2019**

No	Wilayah	Jumlah
1	RPTC	0
2	LBH	0
3	PKT	0
4	PPT	0
5	UPPA	1
6	Trauma Center	0
7	Women Crisis center	0
8	Shalter	0
9	Rumah Singgah	1
10	RPSA	0
11	Panti Asuhan Anak	0
12	LPA	0

Sumber data: Dinas sosial, UPPPA Polres Solok

8.1.6 Kelembagaan Daerah (Unit PP,PA dan KB: Pusat Studi Wanita/Gender: LSM/LBH Peduli Perempuan dan Anak

**Tabel. 8.16
Daftar Kelembagaan Unit Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah DiKabupaten Solok tahun 2019**

No	Wilayah	Nomen Klatur Kelembagaan	Dasar Hukum / Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan Eselonisasi	Alamat Kantor (Telp, Fax, Email)
1	Kab Solok	Dinas Oengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2017	ZULFAHMI, SH.MM	0755 20830

Sumber data: DP3A&P2KB

**8.1.7 Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan tentang
Perlindungan Perempuan**

**Tabel 8.17
Daftar Kelembagaan Pusat Studi Wanita/ Gender DiDaerah
Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Wilayah	Nama Universitas/ Perguruan Tinggi	Dasar Hukum / Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan / Ketua	Alamat Kantor (Telp, Fax, Email)
1	Kab Solok	0	0	0	0

Sumber data: Diknas, Unit PP, PA&KB

8.2 Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

**8.2.1 Peraturan Daerah/Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli
Anak**

**Tabel 8.18
Jumlah Dan Peraturan Yang Peduli anak
Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Wilayah	Jenis Perlindungan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No. 6 Tahun 2015	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

8.2.2 Kelembagaan Partisipasi Anak

**Tabel 8.19
Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan
Hidup Anak Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Wilayah	Organisasi/ Forum Anak	Kegiatan Ekstrakurikuler	Telepon Sahabat Anak 129
1	Kab. Solok	Forum Anak Kelurahan	sosialisasi kekerasan terhadap anak	
2		Kelompok BKB	Penyuluhan kepada ibu kellularga balita	

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN SOLOK 2020**

3	PIK Remaja	Konseling terhadap kesehatan reproduksi remaja	
4	PAUD	peyelenggaraan pendidikan anak usia dini	
5	Sanggar Tari	menyalurkan bakat anak	
6	TPA/TPSA	kegiatan keagamaan	
7	Pramuka	aktifitas anak	

Sumber data: DP3A&P2KB, Diknas

8.2.3 Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif bagi Anak

**Tabel 8.20
Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak
Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Tahun	Gugus Tugas Trafiking	Gugus Tugas KLA	LPA	KPAID	Lain-lain
1	Kab Solok	1	1	0	0	

Sumber data: UPPA, DP3A&P2KB

8.2.4 Peraturan Daerah/Kebijakan/Program/Kegiatan yang mendukung Program PUG

**Tabel 8. 21
Jumlah Dan Peraturan tentang PUG
Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Wilayah	Jenis Perlindungan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Kab Solok	Peraturan Bupati solok tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemkab. Solok	No. 24 Tahun 2014	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

8.2.5 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan dan penanganan korban

**Tabel 8.21
Daftar P2TP2A Kabupaten Solok
tahun 2019**

No	Wilayah	Nama P2TP2A	Alamat	Dasar hukum Pembentukan
1	Kab Solok	P2TP2A Bundo	Koto Baru-Solok	Bupati Solok

Sumber data: DP3A&P2KB

8.2.6 Pokja PUG, Forum Perlindungan Perempuan dan Focal Point Gender

**Tabel 8.22
Pokja PUG, Forum Perlindungan Perempuan dan Anak, Focal
Point Gender Kabupaten Solok
tahun 2019**

No	Wilayah	Pokja PUG	Forum Perlindungan Perempuan	Focal Point Gender
1	Kab Solok	Ada	Ada	Ada

Sumber data: DP3A&P2KB

8.2.7 Jumlah dan Jenis Kebijakan/ Program/Kegiatan Yang Peduli anak

**Tabel 8.23
Jumlah dan Jenis Kebijakan yang Peduli Anak
Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Jenis Kebijakan/ Progam	Nomor	Dikeluarkan Oleh
1	Pembentukan Forum Anak Kabupaten Solok	518-460-2017	Bupati Solok

Sumber data:DPPKBP3A

8.2.8 Kelembagaan Partisipasi anak

**Tabel 8. 24
Jumlah dan Jenis Kebijakan yang Peduli Anak
Kabupaten Solok tahun 2019**

No	Wilayah	Orgnisasi/ Forum	Kegiatan Ekstrakurikuler	Telepon Sahabat Anak
1	Kab. Solok	Forum Anak Kabupaten	Sosialisasi Undang undang Perlindungan Anak, Pertemuan Forum Anak	
		Forum Anak Kecamatan	Sda	
		Forum Anak Nagari	Sda	
2		Kelompok BKB	Penyuluhan	
3		PIK REamaja	Konseling terhadap kesehatan reproduksi remaja	
4		Sanggar tari	Menyalurkan bakat anak	
5		TPA/TPSA	Kegiatan keagamaan	
6		Pramuka	Aktifitas anak	
7		PAUD	Penyelenggaraan Pedidikan Anak Usia Dini	

Sumber data:DPPKBP3A

BAB X
PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) sangat bergantung pada pemahaman dan pengetahuan para pengambil kebijakan tentang status keadilan dan kesetaraan gender di wilayah masing-masing. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender banyak provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sudah banyak pula yang membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja/Pokja PUG dalam mengumpulkan data terpilah, tetapi masih banyak juga yang baru melangkah pada tataran sosialisasi PUG. Pelaksanaan di Kabupaten Solok sendiri sudah berjalan dengan berbagai tahapan dan proses didalamnya, hanya saja ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif dan tersistemik diantaranya :

1. Data masih ada yang belum terpilah laki-laki dan perempuan

Data yang ada pada masing-masing OPD masih ada yang belum terpilah sepenuhnya, termasuk data presesensi kehadiran rapat yang secara komprehensif bersifat total dan tidak terpilah. Padahal tersedianya data terpilah merupakan data pembuka wawasan yang sangat urgent dalam menganalisa data.

2. Pemahaman Gender yang belum komprehensif

Masih dijumpainya yang mempersepsikan gender adalah perempuan, padahal gender disini adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Beberapa istilah dalam pemahaman gender seperti buta gender disini dimaksudkan tidak memahami pengertian gender dan permasalahan gender, sedangkan bias gender merupakan kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat munculnya permasalahan gender. Sedangkan netral

gender adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.

3. Terbatasnya Forum Penguatan Focal Point Gender

Kurangnya pemahaman yang holistik tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi para focal point gender dari masing-masing OPD. Ini disebabkan terbatasnya wadah sosialisasi, walaupun ada pesertanya berganti ganti sehingga sasaran penguatan kapasitas tersebut tidak mengena. Jika dilihat dari pengembangan SDM ASN maka kita bisa melihat belum terintegrasi sepenuhnya pengembangan SDM ASN terkait gender.

4. Orientasi Masih Sebatas Event Evaluasi

Forum-forum penguatan kapasitas tentang gender marak saat mendekati perlombaan sehingga ini masih sebatas tuntutan event dan bukan lagi sebagai kebutuhan yang memang keberadaannya semestinya sebagai bagian dari yang terintegral dari sebuah proses perencanaan.

9.2 Saran dan Rekomendasi

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah rekomendasi atau solusi yang jitu agar pelaksanaan pembangunan PUG di Kabupaten Solok semakin optimal dan berdaya guna. Beberapa rekomendasi diantaranya dapat penulis sampaikan yaitu :

- a. Penguatan Kapasitas SDM Focal Point Gender
- b. Penguatan kapasitas SDM focal point gender dapat dilakukan secara berkala mulai dari bimtek, workshop maupun capacity building yang membahas masalah ataupun issue actual terkait PUG. Selain itu kejelasan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing focal point gender sebagai bagian dari pokja gender. Jika di Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencetak para champions gender nasional maka di level provinsi, kabupaten/kota pun juga bisa demikian yaitu mencetak para champions gender daerah, dengan harapan semakin banyak para

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SOLOK 2019

champions gender maka semakin banyak yang terpapar informasi dan siap menjadi agen perubahan di masing-masing institusi maupun SKPD.

Demikianlah Profil gender dan anak Kabupaten Solok tahun 2020 secara terpilah kami susun, kalau ada kekurangan dalam penyempurnaan penyusunan data ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya. Atas bantuan dan kerja sama dengan SKPD/ Instansi/ Lembaga terkait diucapkan Terima Kasih.